



PEMERINTAH PROVINSI BALI

IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER II TAHUN 2023



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
2024**

KATA PENGANTAR

Pujastuti serta Angayubagya kami haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 ini.

Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 ini merupakan hasil capaian kinerja selama 6 Bulan yang terdiri dari program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern di Pemerintah Provinsi Bali.

Laporan Hasil Pengawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk mengukur hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali yang mencerminkan semua kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023, termasuk juga didalamnya yang terkait masalah hasil pemeriksaan dan pengawasan serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian laporan tahunan ini dapat diselesaikan, kritik dan saran sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini.

Bali, 18 Maret 2024
INSPEKTUR,

IWAYAN SUGIADA
NIP. 19651231 198603 1 175

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Dari hasil analisis dan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 termasuk hasil pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, DAK, LPPD, LKjIP, RKA, RKA Perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan dan Reviu BMD Pemerintah Provinsi Bali.
2. Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali, dari 36 Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi hasilnya dapat di kemukakan bahwa 36 Perangkat Daerah mendapatkan nilai A (Memuaskan).
3. Laporan hasil evaluasi Semester II Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Pemerintah Provinsi Bali, kami mengusulkan : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 94,06, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 92,93, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 91,51, UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 89,73, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,85, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,45.
4. Pada Semester II Tahun 2023 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung.

5. Dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Menuju Bali Era Baru Tahun 2023, antara lain : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali
6. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 3 kegiatan Probit Audit antara lain Probit Audit pada Tahap Pelaksanaan pada Bulan April 2023 sampai dengan Progres Minggu ke-39 (tiga puluh sembilan) untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Probit Audit Tahap Pelaksanaan sampai dengan Serah Terim Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Kanker Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Probit Audit Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegallalang – Bubungbayung.
7. Kegiatan yang juga dilakukan pada Semester II Tahun 2023 adalah monitoring Dana BOS pada Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung dan Karangasem pada 21 Sekolah dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 20.656.721.514,00
8. Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga telah melakukan monitoring terhadap Dana Desa pada Semester II Tahun 2023 yaitu 59 desa di 5 Kabupaten (Tabanan, Buleleng, Gianyar, Bangli, Klungkung) dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 59.000.000.000,00
9. hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **99,93%**
10. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 414 temuan dan 456 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 443 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 13 masih dalam proses dan tidak ada yang belum di tindaklanjuti.

11. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 24 rekomendasi yang statusnya sudah sesuai/selesai dengan persentase **82,7%** dan terdapat 5 rekomendasi yang masih dalam proses.
12. Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Khusus nilai capaian **Pemerintah Provinsi Bali** sebesar **99,20%** dan menduduki **Peringkat I dari 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia**.
13. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pengaduan menyangkut saber pungli, 2 (dua) pengaduan menyangkut gratifikasi, dan 560 (lima ratus enam puluh) pengaduan menyangkut SP4N Laporan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	3
DAFTAR ISI	6
BAB I INFORMASI UMUM	7
A. Dasar Hukum	7
B. Struktur Organisasi	8
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	9
D. Program Pengawasan dan Realisasinya	10
BAB II HASIL PENGAWASAN	12
I. Audit	12
1. Audit Kinerja	11
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu	13
3. Probit Audit	16
II. Reviu	34
III. Evaluasi	81
IV. Pemantauan	106
V. Korsupgah	119
VI. LHP atas Percepatan Stunting	124
VII. Renja PPG	126
VIII. Survei Penilaian Integritas	127
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	128
1. Pemantauan TLHP BPK-RI	128
2. Pemantauan TLHP Pengawasan APIP	128
3. Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri	138
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	140
BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	148
A. Simpulan	148
B. Hambatan	150
C. Rekomendasi	150
BAB VI PENUTUP	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

INFORMASI UMUM

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali secara detail dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

❖ **Struktur Organisasi :**

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektur;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

A. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan Ikhtisar Pelaporan Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Internal adalah:

1. Mendapatkan kesimpulan menyeluruh dari hasil pengawasan;
2. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Internal;
3. Memberikan informasi kepada pihak terkait agar bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan;

4. Mengetahui informasi terkini mengenai kendala-kendala serta keberhasilan yang telah dicapai sebagai acuan untuk dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menyusun sasaran-sasaran yang tertuang dalam program kerja Semester II Tahun 2023.

Program kinerja pengawasan dan realisasinya pada Semester II Tahun 2023, baik yang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1

Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester II Tahun 2023

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT					
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan			
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A		Audit :									
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	3	Rp. 735.887.000,00	3	Rp. 735.887.000,00	-	-	-	-		
2	Probity Audit	3	Rp. 313.199.640.540,00	3	Rp. 313.199.640.540,00	-	-	-	-		
3	Audit Kinerja	4	Rp. 1.556.735.935.066,00	4	Rp. 1.787.418.351.127,00	-	-	-	-		
B		Reviu									
1	Reviu LKPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
2	Reviu RKPD	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	1	Rp. 5.948.536.105.078,00	-	-	-	-		
3	Reviu LPPD	1	-	1	-	-	-	-	-		
4	Reviu DAK	1	-	1	-	-	-	-	-		
5	Reviu RKA	1	Rp. 5.041.197.053.961,00	1	Rp. 5.041.197.053.961,00	-	-	-	-		
6	Reviu RKA Perubahan	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	-	-	-	-		
7	Reviu KUA PPAS	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	1	Rp. 5.983.126.584.360,00	-	-	-	-		
8	Reviu KUA PPAS Perubahan	1	-	1	-	-	-	-	-		
9	Reviu LKJIP	1	-	1	-	-	-	-	-		
10	Reviu Renja	1	Rp5.983.126.584.360,00	1	Rp5.983.126.584.360,00	-	-	-	-		

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				NON PKPT			
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yang diawasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C Evaluasi									
1	Maturitas SPIP	1	Rp. 245.203.051.335	1	Rp. 245.203.051.335	-	-	-	-
2	Evaluasi PPRG	3	-	3	-	-	-	-	-
3	Evaluasi ZI	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Adhyasta Prajaniti	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Evaluasi RB	1	-	1	-	-	-	-	-
6	Evaluasi AKIP	1	-	1	-	-	-	-	-
7	Evaluasi SAKIP	1	-	1	-	-	-	-	-
D Pemantauan									
1	Monev PBJ	1	Rp. 6.933.947.319.883,00	1	Rp. 2.745.859.008.288,59	-	-	-	-
2	Korsupgah	1	-	1	-	-	-	-	-
3	Monev Dana Desa	35	Rp. 35.000.000.000,00	35	Rp. 35.000.000.000,00	-	-	-	-
4	Percepatan Penurunan Stunting	1	-	1	-	-	-	-	-
5	Rencana Kerja PPG	1	-	1	-	-	-	-	-
6	Surevi Penilaian Integritas	1	-	1	-	-	-	-	-
7	Monev Dana Bos	19	Rp. 19.000.000	19	Rp. 19.000.000	-	-	-	-
8	Monev WBS BK	1	-	1	-	-	-	-	-

Keterangan:

- a. OP = Objek Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- c. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target kinerja Semester II Tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan, berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan dalam melaksanakan program kerja yaitu sebagai berikut :

A. Audit

1) Audit Kinerja

Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan sehingga pemeriksa dapat menilai kinerja entitas yang diperiksa, menyimpulkan tujuan pemeriksaan, mengidentifikasi kemungkinan guna memperbaiki kinerja entitas dan mendukung simpulan, temuan dan rekomendasi pemeriksaan. Pelaksanaan Audit Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai PKPT Tahun 2023, terdapat 4 Laporan Hasil Audit antara lain Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Umumj Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan “ADTT” merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah.

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berdasarkan Jenis Audit Semester II Tahun 2023

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah dana OA yang diaudit (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan Audit Tujuan Tertentu Atas Permohonan Audit Dari Kejaksaan Negeri Karangasem Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat Atas Pembangunan Gapura Dan Relief Pada Pintu Masuk Br. Segaa Desa Adat Bugbug Kec.Karangasem Kab.Karangasem	1	Rp. 500.000.000,00	1	Rp. 500.000.000,00		
2	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Sewa Kantin yang Tidak Sesuai Ketentuan di SMAN 4 Denpasar	1	Rp. 40.000.000,00	1	Rp. 40.000.000,00		

3	Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Bali untuk Penyelesaian Pembangunan Menara Lonceng dan Pemberhentian Jalan Salib di Lingkungan Gereja Katolik Santo Petrus Negara Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara	1	Rp. 195.887.000,00	1	Rp. 195.887.000,00		
---	--	---	--------------------	---	--------------------	--	--

Keterangan:

- a. OA = Objek Audit
- b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan.

Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester II Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	-
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	-

Tabel 6
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Semester II Tahun 2023

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara*)	
			Rupiah	Valas**)
1	2	3	4	5
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Semester II Tahun 2023

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Keterangan
			Rupiah	Valas**))	
1	2	3	4	5	6
Penyelidikan	-	-	-	-	-
Penyidikan	-	-	-	-	-
Dihentikan	-	-	-	-	-
Dilimpahkan ke pengadilan	-	-	-	-	-
Penuntutan	-	-	-	-	-
Diputus*)	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Tabel 8
Kode etik dan Standar audit yang digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-Undangan
Kode Etik APIP	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kode Etik P2UPD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
Kode Etik Auditor	Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor Kep-005/AAPII/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia

3) Probity Audit

Probity Audit merupakan kegiatan penilaian secara independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Pada Semester II Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 2 kegiatan Probity Audit antara lain :

1. Probity Audit pada Tahap Pelaksanaan pada Bulan April 2023 sampai dengan Progres Minggu ke-39 (tiga puluh sembilan) untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng **Uraian Hasil *Probity Audit* tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kontruksi adalah bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan sudah dirancang dalam Batasan biaya dan waktu yang telah disepakati serta dengan mutu yang diisyaratkan. Audit atas pelaksanaan kontrakpekerjaan konstruksi mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan pekerjaan 100% selesai dan/atau sebelum penyerahan hasil pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*), termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan, penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak, keadaan kahar, atau pemutusan kontrak. Adapun uraian Hasil Probity pada Tahap Pelaksanaan untuk M-37 sampai dengan M- 39 yaitu:

- 1) Data Proyek

Nama Paket	PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PROVINSI BALI (TOWER TURYPADA)
Lokasi Pekerjaan	Desa Pegayaman, Kecamatan. Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Waktu Pelaksanaan	450 (Empat ratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK
Masa Pemeliharaan	365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender setelah provisional hand over (PHO)
Sumber Dana	APBD Tahun Anggaran 2022 – 2023
Lingkup Pekerjaan	Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: 1) Pekerjaan Persiapan 2) Pekerjaan Struktur 3) Pekerjaan Arsitektur 4) Pekerjaan MEP
Pemberi Tugas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nilai Kontrak	Rp. 283.362.242.000,.
Sisa Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan tanggal 26 April 2023	175 Hari Kalender atau terpakai 275 Hari Kalender
Sifat Kontrak	Design & Build, Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan

- 2) Rekapitulasi Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan April 2023 Berdasarkan hasil pencermatan pada dokumen SP2D diketahui Realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi sebesar Rp76.507.805.340 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN/ TERMIN PEMBAYARAN	JUMLAH UANG (Rp)	NO & TANGGAL SP2D
1	Uang Muka 15 % belanja modal bangunan fasilitas umum	42.504.336.300	12958/SP2D/LS/2.16.2.20.2.21.0 2/2022, Tgl 18 Agustus 2022
2	Termin 1 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.334.489.680	21850/SP2D/LS/2.16.2.20.2.21.0 2/2022, Tgl 30 Desember 2022

3	Termin 2 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.334.489.680	21852/SP2D/LS/2.16.2.20.2.21.0 2/2022, Tgl 30 Desember 2022
4	Termin 3 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.334.489.680	21854/SP2D/LS/2.18.2.20.2.21.0 2/2022 Tgl 30 Desember 2022
		76.507.805.340,00	

3) Pengendalian Kontrak

Tujuan Audit untuk meyakinkan bahwa Konsultan Manajemen Konstruksi telah melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal dan meyakinkan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan baik oleh Penyedia Kontruksi, Konsultan Manajemen Kontruksi maupun para pihak terkait lainnya.

Sesuai dengan Dokumen Rapat Koordinasi Mingguan Proyek Pembangunan Menara Turyapada, diketahui Konsultan Manajemen Konstruksi telah melaksanakan Pemantauan atas progress Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia dan dibahas dalam Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan bukti dokumen berupa laporan progress mingguan dan Notulensi Rapat sebagai berikut:

a. Progres Minggu ke-37 (tiga puluh tujuh) dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023 dengan realisasi progress fisik 29,46% dari rencana 22,10% atau Deviasi Positif 7,36%, Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan adalah:

- Persiapan Area Menara; dan
- Pekerjaan Struktur Menara.

Berikut disajikan Grand Rekapitulasi – Progress Report Minggu ke-37 (tiga puluh tujuh)

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

GRAND REKAPITULASI - PROGRESS REPORT MINGGUAN														
PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN FASILITAS UMUM NO. KONTRAK : B.24.027/10227/IA/D.KOMINFOS TGL. KONTRAK : 13 JULI 2022 SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN : 2022 - 2023 KAB./KOTA : BULELENG PROVINSI : BALI						MINGGU KE 37 23 Mar 2023 s.d 29 Mar 2023 PROG. RENCANA 22.10 PROG. REALISASI 29.46 DEVIASI 7.36								
NO.	URAIAN PEKERJAAN	ADDENDUM 02		JUMLAH TOTAL ROBOT (%)	TOTAL SAMPAI MINGGU LALU (Rp.)	JUMLAH SERAPAN DANA		TOTAL SAMPAI MINGGU INI (Rp.)	PRESTASI DEVIASI (%)	PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN				
		VOLUME	SATUAN			JUMLAH TOTAL HARGA (Rp.)	TOTAL MINGGU INI (Rp.)			TOTAL SAMPAI MINGGU LALU (%)	TOTAL MINGGU INI (%)			
I PEKERJAAN PERENCANAAN														
A PEKERJAAN PERENCANAAN														
A.I	PERENCANAAN RANCANGAN GAMBAR DAN DOKUMENTASI	1.00	Ls	7,509,099,413	2.94	5,631,824,560	-	5,631,824,560	75.00	2.21	-	2.21		
A.II	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	1.00	Ls	1,686,772,376	0.66	1,208,384,462	-	1,208,384,462	71.64	0.47	-	0.47		
SUB TOTAL I.A				9,195,871,789	3.60	6,840,209,022	-	6,840,209,022		2.68	-	2.68		
II PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA														
B PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA														
B.I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00	Ls	13,254,434,478	5.19	9,152,742,868	164,000,000	9,316,742,868	70.29	3.59	0.06	3.65		
SUB TOTAL II.B				13,254,434,478	5.19	9,152,742,868	164,000,000	9,316,742,868		3.59	0.06	3.65		
III PEKERJAAN MENARA														
C PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA														
C.I	PEKERJAAN MOB-DEMABILISASI ALAT	1.00	Ls	1,423,500,000	0.56	711,250,000	-	711,250,000	50.00	0.28	-	0.28		
C.II	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN AREA MENARA	1.00	Ls	3,158,495,435	1.24	3,158,495,435	-	3,158,495,435	100.00	1.24	-	1.24		
C.III	PEKERJAAN AKSES JALAN AREA MENARA	1.00	Ls	1,669,205,701	0.65	1,173,593,887	-	1,173,593,887	70.31	0.46	-	0.46		
SUB TOTAL III.C				6,250,201,136	2.45	5,043,339,322	-	5,043,339,322		1.98	-	1.98		
D PEKERJAAN STRUKTUR														
D.I	PEKERJAAN STRUKTUR MENARA	1.00	Ls	100,887,694,506	39.52	41,079,103,226	1,801,731,597	42,880,834,823	42.50	16.09	0.71	16.80		
SUB TOTAL III.D				100,887,694,506	39.52	41,079,103,226	1,801,731,597	42,880,834,823		16.09	0.71	16.80		
E PEKERJAAN ARSITEKTUR														
E.I	PEKERJAAN ARSITEKTUR MENARA	1.00	Ls	30,154,105,995	11.81	-	-	-	-	-	-	-		
E.II	PEKERJAAN SANITARY MENARA	1.00	Ls	907,445,987	0.36	-	-	-	-	-	-	-		
E.III	PEKERJAAN ARSITEKTUR TAMBAHAN	1.00	Ls	6,830,370,848	2.68	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL III.E				37,891,922,830	14.84	-	-	-	-	-	-	-		
F PEKERJAAN LOBBY														
F.I	PEKERJAAN STRUKTUR LOBBY	1.00	Ls	1,147,085,056	0.45	-	-	-	-	-	-	-		
F.II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LOBBY	1.00	Ls	1,223,317,346	0.48	-	-	-	-	-	-	-		
F.III	PEKERJAAN SANITARY LOBBY	1.00	Ls	96,040,397	0.04	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL III.F				2,466,442,799	0.97	-	-	-	-	-	-	-		
G PEKERJAAN CANDI BENTAR														
G.I	PEKERJAAN STRUKTUR CANDI BENTAR	1.00	Ls	471,789,391	0.18	-	-	-	-	-	-	-		
G.II	PEKERJAAN ARSITEKTUR CANDI BENTAR	1.00	Ls	746,551,450	0.29	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL III.G				1,218,340,841	0.48	-	-	-	-	-	-	-		
H PEKERJAAN JALAN DAN OPT AREA MENARA														
H.I	PEKERJAAN JALAN DAN OPT AREA MENARA	1.00	Ls	8,669,587,179	3.40	1,019,885,069	-	1,019,885,069	11.76	0.40	-	0.40		
SUB TOTAL III.H				8,669,587,179	3.40	1,019,885,069	-	1,019,885,069		0.40	-	0.40		
I PEKERJAAN SIGNAGE														
I.I	PEKERJAAN SIGNAGE	1.00	Ls	680,933,862	0.27	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL III.I				680,933,862	0.27	-	-	-	-	-	-	-		
IV PENUNJANG & PRASARANA														
SUB TOTAL IV				-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING														
J PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING														
J.I	PENYAMBUNGAN DAYA	1.00	Ls	1,193,284,121	0.47	-	-	-	-	-	-	-		
J.II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.00	Ls	17,781,999,681	6.97	-	-	-	-	-	-	-		
J.III	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	1.00	Ls	178,846,025	0.07	-	-	-	-	-	-	-		
J.IV	PEKERJAAN ELEKTRONIK	1.00	Ls	5,234,462,640	2.05	-	-	-	-	-	-	-		
J.V	PEKERJAAN PEMANCAR TV	1.00	Ls	12,622,448,241	4.94	10,097,958,593	-	10,097,958,593	80.00	3.96	-	3.96		
J.VI	PEKERJAAN SPASIA LIGHTNING	1.00	Ls	7,061,278,189	2.77	-	-	-	-	-	-	-		
J.VII	INSTALASI PLUMBING	1.00	Ls	4,020,362,324	1.57	-	-	-	-	-	-	-		
J.VIII	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN	1.00	Ls	7,636,762,769	2.99	-	-	-	-	-	-	-		
J.IX	INSTALASI TATA UDARA	1.00	Ls	7,755,615,093	3.04	-	-	-	-	-	-	-		
J.X	PEKERJAAN ELEVATOR	1.00	Ls	11,280,790,596	4.42	-	-	-	-	-	-	-		
SUB TOTAL V				74,765,869,679	29.29	10,097,958,593	-	10,097,958,593		3.96	-	3.96		
JUMLAH TOTAL				255,281,299,099	100.00	73,233,238,100	1,965,731,597	75,198,969,697		28.69	0.77	29.46		
										PROGRESS MINGGUAN RENCANA		21.47	0.63	22.10
										PROGRESS MINGGUAN AKTUAL / REALISASI		28.69	0.77	29.46
										DEVIASI / SIMPANGAN		7.22	0.14	7.36

Berdasarkan Surat Nomor 041/SUR-TTKBS6.0/LPPMUNUD/III/2023, tanggal 6Maret 2023, hal Undangan Rapat Koordinasi Mingguan yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2023 dengan Notulensi Rapat sebagai berikut:

- (R9) Progres pekerjaan corewall tidak sesuai rencana, pihak HK - YK KSObelum melakukan inovasi untuk percepatan. Target pengecoran tanggal 5 April 2023;
- (R5) Banyak ditemukan Kolom yang miring. Pihak HK agar lebih diperhatikan vertikaliti pekerjaan bekisting kolom;
- Tim QC dari HK & YK - KSO agar memantau pekerjaan dilapangan secaraContinue.

Berdasarkan Surat Nomor 042/SUR-TTKBS6.0/LPPMUNUD/IV/2023, tanggal 10 April 2023, hal Undangan Rapat Koordinasi Mingguan yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023 dengan Notulensi Rapat sebagai berikut:

- (R11) Direksi HK menyadari kekurangan Tenaga dan Peralatan. (Penambahan tenaga kerja masih kurang maksimal Masih banyak areayang kosong,
- (R2) Climbing form agar ditambahkan railing pegangan / pembatas. Penambahan relling dan climbing form sudut.

Disarankan:

- Pihak HK-YK KSO agar mencermati produktifitas kerja dengan pembagianjam kerja. Jumlah tenaga kerja dan pembukaan lahan kerja sesuai jumlah tenaga lebih dikontrol), penambahan tenaga kerja agar dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti perkembangan pekerjaan dilapangan;
- Keamanan climbing form agar dipantau, karena masih ada climbing form yang berlubang;
- Climbing form agar ditambahkan railing pegangan/pembatas, Penambahan relling dan climbing form sudut.

c. Progres Minggu ke-39 (tiga puluh sembilan) dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan 12 April 2023 dengan realisasi progress fisik 30,67% dari rencana 22,81% atau Deviasi Positif 7,86%, adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pekerjaan Perencanaan;
- Pekerjaan Persiapan Area Menara;

Berikut disajikan Grand Rekapitulasi – Progress Report Minggu ke-39

Iktisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

GRAND REKAPITULASI - PROGRESS REPORT MINGGUAN													
PEKERJAAN : PAKET PEKERJAAN BELANJA MODAL BANGUNAN FASILITAS UMUM												MINGGU KE 39 6 April 2023 s.d 12 April 2023 PROG. RENCANA 22.81 PROG. REALISASI 30.67 DEVIASI 7.86	
NO. KONTRAK : B.24.0277/2023/AN/D.KOMINFOS													
TGL KONTRAK : 13 JUNI 2022													
SUMBER DANA : APBD													
TAHUN ANGGARAN : 2022 - 2023													
KAB. / KOTA : BULELENG													
PROVINSI : BALI													
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	ADDENDUM 02		JUMLAH SERAPAN DANA			PRESTASI KEMAJUAN PEKERJAAN				
				JUMLAH TOTAL BANGUNAN (Rp)	JUMLAH TOTAL BOBOT (%)	TOTAL SAMPAI MINGGU LALU (Rp)	TOTAL MINGGU INI (Rp)	TOTAL SAMPAI MINGGU LALU (Rp)	TOTAL MINGGU INI (Rp)	TOTAL PRESTASI DIVISI (%)	TOTAL SAMPAI MINGGU LALU (%)	TOTAL MINGGU INI (%)	TOTAL SAMPAI MINGGU INI (%)
I PEKERJAAN PERENCANAAN													
A PEKERJAAN PERENCANAAN													
A.I	PERENCANAAN RANCANGAN GAMBAR DAN DOKUMENTASI	1.00	Ls	7,509,099,413	2.94	4,242,641,168	-	4,242,641,168	56.50	1.66	-	1.66	
A.II	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	1.00	Ls	1,686,772,376	0.66	1,208,384,462	-	1,208,384,462	71.64	0.47	-	0.47	
SUB TOTAL I.A				9,195,871,789	3.60	5,451,025,631	-	5,451,025,631	2.14	-	-	2.14	
II PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA													
B PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA													
B.I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00	Ls	13,254,434,478	5.19	9,316,742,868	-	9,316,742,868	70.29	3.65	-	3.65	
SUB TOTAL II.B				13,254,434,478	5.19	9,316,742,868	-	9,316,742,868	3.65	-	-	3.65	
III PEKERJAAN MENARA													
C PEKERJAAN PERSIAPAN AREA MENARA													
C.I	PEKERJAAN MOB-DEMobilisasi ALAT	1.00	Ls	1,422,500,000	0.56	711,250,000	-	711,250,000	50.00	0.28	-	0.28	
C.II	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN AREA MENARA	1.00	Ls	3,158,495,435	1.24	3,158,495,435	-	3,158,495,435	100.00	1.24	-	1.24	
C.III	PEKERJAAN AKSES JALAN AREA MENARA	1.00	Ls	1,669,205,701	0.65	1,173,593,887	-	1,173,593,887	70.31	0.46	-	0.46	
SUB TOTAL III.C				6,250,201,136	2.45	5,043,339,322	-	5,043,339,322	1.98	-	-	1.98	
D PEKERJAAN STRUKTUR													
D.I	PEKERJAAN STRUKTUR MENARA	1.00	Ls	100,887,694,506	39.52	44,729,938,308	1,990,208,320	46,720,146,628	46.31	17.52	0.78	18.30	
SUB TOTAL III.D				100,887,694,506	39.52	44,729,938,308	1,990,208,320	46,720,146,628	17.52	0.78	18.30	-	-
E PEKERJAAN ARSITEKTUR													
E.I	PEKERJAAN ARSITEKTUR MENARA	1.00	Ls	30,154,105,995	11.81	-	-	-	-	-	-	-	
E.II	PEKERJAAN SANITARY MENARA	1.00	Ls	907,445,987	0.36	-	-	-	-	-	-	-	
E.III	PEKERJAAN ARSITEKTUR TAMBAHAN	1.00	Ls	6,830,370,948	2.68	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL III.E				37,891,922,830	14.84	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL III.E				37,891,922,830	14.84	-	-	-	-	-	-	-	
F PEKERJAAN LOBBY													
F.I	PEKERJAAN STRUKTUR LOBBY	1.00	Ls	1,147,085,056	0.45	-	-	-	-	-	-	-	
F.II	PEKERJAAN ARSITEKTUR LOBBY	1.00	Ls	1,223,317,346	0.48	-	-	-	-	-	-	-	
F.III	PEKERJAAN SANITARY LOBBY	1.00	Ls	96,040,397	0.04	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL III.F				2,466,442,799	0.97	-	-	-	-	-	-	-	
G PEKERJAAN CANDI BENTAR													
G.I	PEKERJAAN STRUKTUR CANDI BENTAR	1.00	Ls	471,789,391	0.18	-	-	-	-	-	-	-	
G.II	PEKERJAAN ARSITEKTUR CANDI BENTAR	1.00	Ls	746,551,450	0.29	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL III.G				1,218,340,841	0.48	-	-	-	-	-	-	-	
H PEKERJAAN JALAN DAN DPT AREA MENARA													
H.I	PEKERJAAN JALAN DAN DPT AREA MENARA	1.00	Ls	8,669,587,179	3.40	1,535,063,838	121,325,490	1,656,389,328	19.11	0.60	0.05	0.65	
SUB TOTAL III.H				8,669,587,179	3.40	1,535,063,838	121,325,490	1,656,389,328	0.60	0.05	0.65	-	
I PEKERJAAN SIGNAGE													
I.I	PEKERJAAN SIGNAGE	1.00	Ls	680,933,862	0.27	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL III.I				680,933,862	0.27	-	-	-	-	-	-	-	
IV PENUNJANG & PRASARANA													
SUB TOTAL IV				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING													
J PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING													
J.I	PENYAMBUNGAN DAYA	1.00	Ls	1,193,284,121	0.47	-	-	-	-	-	-	-	
J.II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	1.00	Ls	17,781,999,681	6.97	-	-	-	-	-	-	-	
J.III	PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	1.00	Ls	178,846,025	0.07	-	-	-	-	-	-	-	
J.IV	PEKERJAAN ELEKTRONIK	1.00	Ls	5,234,462,640	2.05	-	-	-	-	-	-	-	
J.V	PEKERJAAN PEMANGKAR TV	1.00	Ls	12,622,448,241	4.94	10,097,958,593	-	10,097,958,593	80.00	3.96	-	3.96	
J.VI	PEKERJAAN SPASIA LIGHTNING	1.00	Ls	7,061,278,189	2.77	-	-	-	-	-	-	-	
J.VII	INSTALASI PLUMBING	1.00	Ls	4,020,362,324	1.57	-	-	-	-	-	-	-	
J.VIII	INSTALASI PEMADAM KEBAKARAN	1.00	Ls	7,636,782,769	2.99	-	-	-	-	-	-	-	
J.IX	INSTALASI TATA UDARA	1.00	Ls	7,755,615,093	3.04	-	-	-	-	-	-	-	
J.X	PEKERJAAN ELEVATOR	1.00	Ls	11,280,790,596	4.42	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL V				74,765,866,679	29.29	10,097,958,593	-	10,097,958,593	3.96	-	3.96	-	
JUMLAH TOTAL				255,281,299,099	100.00	76,174,068,561	2,111,533,810	78,285,602,371	29.84	0.83	30.67	-	
									PROGRESS MINGGUAN RENCANA 22.60 0.21 22.81 PROGRESS MINGGUAN AKTUAL / REALISASI 29.84 0.83 30.67 DEVIASI / SIMPANGAN 7.24 0.62 7.86				

Berdasarkan Surat Nomor 044/SUR-TTKBS6.0/LPPMUNUD/IV/2023, tanggal 24 April 2023, hal Undangan Rapat Koordinasi Mingguan yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023 dengan Notulensi Rapat sebagai berikut:

- (R16) Justifikasi teknik terkait perubahan disain arsitektur yang berpengaruh terhadap disain struktur dan struktur yang sedang/sudah dikerjakan belum dibuatkan.
- (R7) Dokumen BGH sudah disubmit. Dokumen BGH mohon segera diselesaikan agar lanjut proses penilaian di PU. Tanggal 15 Mei 2023 sudah presentasi, namun masih banyak yang perlu diperbaiki sesuai masukan tim MK. Tim BGH harap berkoordinasi dahulu dengan pihak HK - YK KSO.
- (R2) Justifikasi mengenai perhitungan 3 lapis menjadi 2 lapis belum disubmit ke MK.

Disarankan:

- Perubahan - perubahan yang terjadi agar segera dibuatkan justifikasinya.
- Dokumen BGH agar segera dilengkapi sesuai kesepakatan perubahan disain dan disubmit ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, karena ada proses saat penilaian;
- Justifikasi mengenai perhitungan 3 lapis menjadi 2 lapis agar segera di submit ke MK, dimana untuk segment 4 digunakan 3 lapis, sedangkan segment 5 keatas digunakan 2 lapis.

2. Probit Audit Tahap Pelaksanaan sampai dengan Serah Terim Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Kanker Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali

I. Proses Pelaksanaan Kontrak

a) Pengendalian Kontrak

Tujuan Audit pada tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa Konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi telah melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dengan maksimal.

- 1) Pemantauan Progres Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Kanker Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sudah dilakukan dan dilaporkan secara Mingguan melalui Rapat Mingguan yang diadakan setiap hari Selasa. Dari laporan yang disampaikan, deviasi pekerjaan selalu positif.
- 2) Perwakilan Konsultan Pengawas sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 1387 Tahun 2023, tanggal 28 Januari 2023 juga telah ikut melakukan visitasi Layanan Kedokteran Nuklir dan Instalasi Pengolahan Akhir Limbah (IPAL) Kedokteran Nuklir ke RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung dan RS. Kanker Dharmais yang dilaksanakan pada tanggal 30 s.d 31 Januari 2023.
- 3) Saran/Masukan yang disampaikan kepada RSUD Bali Mandara pada saat Rapat Mingguan dari bulan Januari s.d. Mei 2023 agar memerintahkan Konsultan Pengawas untuk melanjutkan Pengawasan Pekerjaan antara lain :
 - Memastikan kelayakan/fungsi Pengetesan Limbah Medis.
 - Terkait Penampungan Limbah Laboratorium khususnya Lab Patologi yang dilakukan penampungan menggunakan jirigen agar sesuai aturan dari Lingkungan Hidup terkait Penatalaksanaan Limbah Medis.
 - Catatan Evaluasi Pekerjaan dari Konsultan Pengawas agar dibuat.
 - Laporan Mingguan agar dimintakan tanda tangan PPK.
 - Pengamanan progres pekerjaan dengan memaksimalkan pekerja dan tetap mempertahankan kualitas.
 - Setiap Rapat Mingguan agar dilengkapi dengan Notulen/Berita Acara Rapat Pemantauan.
 - Memastikan Konsultan Pengawas hadir sesuai pekerjaan yang dilaksanakan agar kualitas pengawasan pekerjaan maksimal.
 - Agar selalu mengikuti peraturan yang berlaku terkait Pekerjaan Tambahan pada Ruang *Hotlab*.

- Untuk pekerjaan yang berdeviasi negatif, agar dimaksimalkan penyelesaiannya.
- Membuat *breakdown* atas sisa pekerjaan sehingga monitoring atas progres pekerjaan bisa dilakukan secara maksimal
- *Reschedule* Jadwal Pekerja untuk mengantisipasi libur hari raya dan memastikan libur tidak mengganggu progres pekerjaan.
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) agar segera diurus.
- Memastikan alat-alat kesehatan yang sudah datang namun belum terpasang ditempatkan dengan baik agar tidak mengganggu mobilitas.
- Untuk pekerjaan yang dilakukan pengetesan agar dibuatkan Berita Acara Pengujian (*Test Commission*)
- Memastikan deviasi positif atas pekerjaan memang telah sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
- Untuk pekerjaan yang berdeviasi negatif/belum mencapai target, agar dimaksimalkan penyelesaiannya, jangan sampai minta perpanjangan waktu di akhir Kontrak.
- Untuk pekerjaan yang berdeviasi negatif, agar dibuatkan catatan/penjelasan kenapa bisa negatif dan bagaimana strategi untuk mengatasinya.
- Cek volume pekerjaan apakah sudah sesuai dengan Kontrak/Spesifikasi. Jangan baru melaksanakan pengecekan diakhir Kontrak.
- Untuk alat kesehatan dan kelengkapannya yang datang setelah serah terima pekerjaan dilakukan, agar dipastikan masuknya alat tidak membobok dinding.

Rekomendasi tertulis terkait saran ini juga telah disampaikan kepada RSUD Bali Mandara sesuai surat Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/7181/IR.V/Itprov tanggal 11 April 2023.

b) Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Tujuan audit pada tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa Perubahan Kegiatan Pekerjaan dan prosedurnya sesuai Kontrak.

Dari hasil konfirmasi per tanggal 22 Mei 2023, didapatkan informasi bahwa untuk Konsultan Pengawas tidak ada *Addendum* Kontrak. Hanya terdapat pergantian Personil Pengawas Lapangan sesuai Surat Usulan Pergantian Personil PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa Nomor : 062/UPP-DR/17-XI/2022, tanggal 29 November 2022.

Dari Rapat Mingguan yang diadakan, terdapat beberapa saran untuk Konsultan Pengawas, antara lain :

- Setiap Perubahan baik Struktur dan Material agar dilengkapi Kajian oleh Konsultan Pengawas.
- Jika ada Perubahan Pekerjaan agar dibuatkan Kajian oleh Konsultan Pengawas dan dapatkan Persetujuan PPK untuk setiap Perubahan Pekerjaan.
- Kelengkapan untuk Addendum Kontrak agar dilengkapi sesuai proses baik untuk Tahapan Perhitungan Bersama agar melalui meeting dan ada Notulensi.
- Pengawas jangan hanya berpedoman pada Kontrak saja. Kalau perlu dilakukan penyempurnaan atas gambar yang ada sehingga bangunan bisa berfungsi secara maksimal sekaligus memetakan masalah dan risiko yang muncul.

Rekomendasi tertulis terkait saran ini juga telah disampaikan kepada RSUD Bali Mandara sesuai surat Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor B.09.700/7181/IR.V/Itprov tanggal 11 April 2023

c) Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Tujuan Audit pada tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh Penyedia dan PPK telah sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Kontrak.

Terkait Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan telah dilakukan pemantauan oleh Konsultan Pengawas dan sudah dibuatkan *check list* oleh Pelaksana dan ditindaklanjuti sesuai saran Pengawas.

Sesuai hasil peninjauan Tim *Probity* ke lokasi pekerjaan tanggal 10 Mei 2023, terdapat beberapa catatan antara lain :

- Ruang Gamma Camera :

Pada Ruang Gamma Camera tidak bisa dilakukan *finishing* karena menyesuaikan dengan alat yang akan di-*install*. Untuk *finishing* akan menjadi tanggung jawab Penyedia Alat.

Terdapat dinding sebagai tempat masuk alat tidak akan dibuat permanen, hanya akan ditutup dengan *partisi board*. Sedangkan pintu Pb2 akan sudah terpasang pada tanggal 16 Mei 2023.

Yang dikerjakan diruang Gamma Camera hanya pekerjaan pasang Pintu Pb, Pekerjaan Pemasangan Timbal, Pekerjaan Plafon dan Pekerjaan Instalasi MEP. Perubahan ini sudah masuk dalam Pekerjaan Tambah Kurang.

- Ruang Isolasi I : Saklar Ruang Isolasi belum hidup/lampu mati, *exhaust* bermasalah.
- Semua Pintu Pb di Ruang Isolasi tidak dipasang presisi.
- Jendela Ruang Isolasi III tidak tertutup dengan baik dan lampu kamar mandi mati
- AC dikamar di-Ruang Isolasi III, IV dan V tepat terpasang diatas kepala pasien.

Hasil klarifikasi dengan Inspektor Lapangan menyatakan bahwa pemasangan difuser AC di ruang isolasi berada di atas tempat tidur pasien karena sudah sesuai dengan produk perencanaan yang memposisikan difuser AC berada diposisi tersebut. Jika memperhatikan arah aliran/hembusan udara dingin yang keluar dari unit difuser tersebut diprediksi tidak akan mengganggu kenyamanan pasien karena hembusan udara tidak langsung menuju arah pasien tidur akan tetapi akan berhembus horisontal/kesamping.

Sesuai hasil peninjauan ke lokasi pekerjaan tanggal 11 Mei 2023, terdapat beberapa catatan antara lain :

- Ruang ME

Pekerjaan Pemasangan Bak *Zink 1 Bowl + 1 drainer* Uk.860x510x223 mm Modena belum terpasang karena beton meja retak. Sesuai laporan tanggal 7 Mei 2023, progres pekerjaan sudah 100%.

Slot Jendela sebanyak 5 buah bermasalah/tidak bisa ditutup.

- Ruang Gudang

Slot Jendela sebanyak 1 buah tidak bisa ditutup

Sesuai hasil peninjauan ke lokasi pekerjaan tanggal 16 Mei 2023 didapatkan hasil cek fisik tanggal 10 dan 11 Mei 2023 telah ditindaklanjuti penyedia kontruksi. Namun masih ada beberapa catatan antara lain :

- Terdapat pintu di Lantai 2 masih bercelah. Hasil konfirmasi dengan pelaksana menyatakan bahwa sesuai gambar rencana pintu memang tidak diisi lis.
- Kurang kerapian pada beberapa sudut yang masih lubang
- Pintu Ruang Isolasi di Lantai 3 masih belum presisi. Hasil konfirmasi dengan Pelaksana menyatakan bahwa sudah dikoordinasikan perbaikannya dengan Vendor.
- AC yang dipasang diatas kepala pasien di Ruang Isolasi, sesuai petunjuk Direktur akan dipindahkan, agar posisinya tidak tepat diatas kepala pasien.

Disarankan kepada Konsultan Pengawas agar memastikan semua catatan Tim *Probity* bisa diselesaikan secara maksimal dan memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu dan berfungsi dengan baik.

d) Pembayaran Prestasi Kerja

Tujuan audit pada tahap ini adalah untuk meyakinkan bahwa pembayaran pekerjaan tidak melebihi prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dari hasil pencermatan atas Pengajuan Pembayaran Termin II dengan kwitansi tertanggal 2 April 2023, sebesar Rp227.301.887,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) diperoleh informasi :

- Surat Mohon Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa Nomor : 075.01/DR-BBW/PENG/27.1/III/2023, tanggal 27 Maret 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPK dan Tim Teknis Pemeriksaan Nomor : B.37.027/6284.23/SDP/RSBM, tanggal 28 Maret 2023
- Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 075.01/DR-BBW/PENG/27.2/III/2023, tanggal 29 Maret 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : B.37.027/6479.23/SDP/RSBM, tanggal 30 Maret 2023.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin II PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa Nomor : 075.01/DR-BBW/PENG/27.3/III/2023, tanggal 31 Maret 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : B.37.027/6701.23/SDP/RSBM, tanggal 1 April 2023.
- Pembayaran sudah dikurangi Pengembalian Uang Muka.

e) Pembayaran Hasil Pekerjaan Tujuan Audit

Untuk meyakinkan bahwa :

- 1) pembayaran hasil pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai, yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- 2) diterimanya jaminan pemeliharaan atau retensi;
- 3) telah diperhitungkan dengan uang muka, pajak, ganti rugi, denda (bila ada);
- 4) perhitungan denda, ganti rugi sesuai dengan kontrak.

Dari hasil pencermatan atas Pengajuan Pembayaran Termin III dengan kwitansi tertanggal 19 Mei 2023, sebesar Rp212.563.474,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) diperoleh informasi :

- Sudah terdapat Surat Permohonan Pembayaran Termin III dari PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa kepada PPK sesuai Surat Nomor : 059/SP_DR/07/V/2023, tanggal 19 Mei 2023.

- Sudah terdapat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPK dan Tim Teknis Pemeriksaan Nomor : B. 37.027/10101.23/SDP/RSBM, tanggal 16 Mei 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III dari Penyedia kepada PPK sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/SP-DR/07//V/2023, tanggal 16 Mei 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III dari PPK kepada PA/KPA sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III Nomor : B.37.027/10102.23/SDP/RSBM, tanggal 16 Maret 2023.
- Surat Permohonan Pembayaran Termin III (100%) PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa Nomor : 059/SP_DR/07/V/2023, tanggal 19 Mei 2023.
- Sudah terdapat Berita Acara Pembayaran Termin III Nomor : B.37.027/10204.23/SDP/RSBM, tanggal 19 Maret 2023. Pembayaran sudah dikurangi Pengembalian Uang Muka dan ditambah Pajak 11%.

Catatan Tim *Probity* :

Dari hasil pencermatan atas Dokumen Pertanggungjawaban Pembayaran Konsultan Pengawas mulai dari Pembayaran Uang Muka s.d. Termin III, ditemukan volume waktu layanan yang dibayarkan untuk Konsultan Pengawas secara kumulatif berbeda dengan volume waktu layanan pada kontrak dengan rincian :

No.	uraian	Kontrak	SPJ	Selisih
1	Team Leader	6	5,5	-0,5
2	Ahli Struktur	6	5,5	-0,5
3	Ahli Teknik tenaga Listrik	3	4,1	+1,1
4	Ahli Plumbing	3	4	+1
5	Ahli Teknik Tata Udara dan Refrigerasi	3	3	-
6	Ahli Teknik Fisika	3	3	-
7	Ahli K3 Konstruksi	6	5,5	-0,5
8	Pengawas Lapangan Sipil	6	5,5	-0,5
9	Pengawas Lapangan MEP	6	5,5	-0,5
10	Administrasi / Keuangan	6	5,5	-0,5

Kondisi ini tidak sesuai dengan Syarat Syarat Umum Kontrak Angka 40 (tanggung jawab) yang menyatakan Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, **ketepatan volume**, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Disarankan kepada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali agar memastikan perhitungan yang tepat untuk pembayaran tenaga Konsultan Pengawas dengan catatan :

- a. Tenaga Ahli Teknik Tenaga Listrik dan Tenaga Ahli Plumbing agar dibayarkan sesuai Kontrak (3 bulan).
- b. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung Lainnya dibayarkan sesuai dengan volume waktu layanan yang diberikan.

II. Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi

a) Serah Terima Pertama Pekerjaan

Tujuan Audit adalah untuk meyakinkan bahwa Pekerjaan Konstruksi telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Kontrak. Dari hasil pencermatan administrasi terhadap kelengkapan dokumen Serah Terima Pekerjaan yang diserahkan oleh RSUD Bali Mandara didapatkan informasi :

- 1) Sudah terdapat Surat Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PT. Demensi Ronakon KSO CV. Bina Bwana Wisesa kepada PPK sesuai Surat Nomor : 057/SP-DR/07/V/2023, tanggal 15 Mei 2023.
- 2) Sudah terdapat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan PPK dan Tim Teknis Pemeriksaan Nomor : B. 37.027/10101.23/SDP/RSBM, tanggal 16 Mei 2023.
- 3) Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III dari Penyedia kepada PPK sesuai BAST Nomor 058/SP-DR/07//V/2023 tanggal 16 Mei 2023.
- 4) Sudah terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III dari PPK kepada PA/KPA sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Termin III Nomor : B.37.027/10102.23/SDP/RSBM, tanggal 16 Maret 2023.

Dari hasil konfirmasi kepada PPK didapatkan informasi bahwa Pedoman/Petunjuk Pemeliharaan dan Penggunaan Bangunan Gedung belum diserahkan sampai tanggal 29 Mei 2023.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Syarat Syarat Khusus Kontrak Angka 35.1 yang menyatakan bahwa;

- a. Gambar "As Built" diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari Kalender sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- b. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari Kalender sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan; dan/atau
- c. Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan untuk Pelatihan Tenaga Operator dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan PPK.

Disarankan kepada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali agar segera menyerahkan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan sesuai ketentuan yang diatur dalam SSKK.

- b) Pencatatan Barang ke dalam Daftar Aset

Tujuan Audit adalah memastikan bahwa barang sudah dimasukkan ke dalam Daftar Aset Tetap.

Dari Kontrak Pembangunan Lanjutan Gedung Kanker, terdapat beberapa Aset tetap seperti AC, CCTV, Alat Pemadam Kebakaran, dan lain-lain.

Sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 Tim *Probity* belum menerima Rekap Aset Hasil Pengadaan dan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali belum membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang pada Pasal 31 *menyebutkan*;

- 1) Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan BMD kepada Pengguna Barang.
- 2) Pengguna Barang wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan BMD kepada Gubernur melalui Pengelola BMD untuk ditetapkan status penggunaannya.

- 3) Laporan Hasil Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Laporan Hasil Pengadaan :
 - a. Bulanan
 - b. Semesteran; dan
 - c. Tahunan.
- 4) Laporan Hasil Pengadaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat disampaikan setiap Triwulan dengan tujuan efisiensi pelaporan.

Disarankan kepada RSUD Bali Mandara agar memastikan semua aset hasil pengadaan tercatat dalam Buku Inventaris RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

3. Probity Audit Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegalalang – Bubungbayung

LAPORAN M11 (16 Juli - 23 Juli 2023)																																																																																																																																																																																									
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegalalang – Bubungbayung																																																																																																																																																																																									
Konsultansi : CV. Abri Ananta Konsultan, PT. Putra Dmitri Desain KSO			No Kont : B.29.602/16422/BM/PUPR/KIM			SPMK : B.29.600/6506/PUPR/KIM																																																																																																																																																																																			
Pekerjaan : Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud - Tegalalang - Bubungbayung			11/AAK-PDD/V/2023			Tanggal : 12 Mei 2023																																																																																																																																																																																			
Lokasi : Kabupaten Gianyar			Tanggal : 11 Mei 2023																																																																																																																																																																																						
Nilai Kontra : Rp. 618.671.743,97																																																																																																																																																																																									
Kontraktor : PT. Pramana Artha Raharja			No. Kontrak : B.29.602.16462/BM/PUPR/KIM																																																																																																																																																																																						
Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Provinsi Ubud - Tegalalang - Bubungbayung			Tanggal : 11 Mei 2023																																																																																																																																																																																						
Lokasi : Kabupaten Gianyar			Tanggal SPMK : 12 Mei 2023																																																																																																																																																																																						
Nilai Kontra : Rp.28.885.003.000,00																																																																																																																																																																																									
PERMASALAHAN : <ul style="list-style-type: none"> * Pek. Bongkar pelat beton dan bekasnya belum diangkut * Paving kuning (penunton) belum ada dilapangan. * Pemasangan Uditch sempat nihil beberapa hari. 				Jadwal Pelaksanaan 210 Hari Kalender								RINGKASAN PROGRES : Waktu Pelaksanaan : 210 Hr Ktd Waktu Berjalan : 73 Hr Waktu Sisa : 137 Hr Rencana : 13,42 % Realisasi : 14,81 % Deviasi : + 1,39 % Konsultan Supervisi CV. Abri Ananta Konsultan, PT. Putra Dmitri Desain  Ir. I Made Sumardika Team Leader																																																																																																																																																																													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Urutan</th> <th colspan="3">MEI</th> <th colspan="4">JUNI</th> <th colspan="3">JULI</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rencana</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Realisasi</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Deviasi</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										Urutan	MEI			JUNI				JULI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Deviasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urutan	MEI			JUNI				JULI																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																														
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
Rencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
Deviasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
SOLUSI : <ul style="list-style-type: none"> * Segera bersihkan bekas galian sehingga pekerjaan pasang Batu Mortar bisa segera dimulai. * Paving penunton segera diusahakan agar pemasangan paving blok bisa bersamaan * Pekerjaan Pasang Uditch jangan sampai ada off mengingat pekerjaan dilaksanakan malam hari, waktu dan tenaga kerja tidak maksimal. 																																																																																																																																																																																									



20/07/23 21:40:38
Ubud Tegalalang Bubungbayung
Rencana
STA 2 + 250 L
50

PEK. CAMP. ASPAL PANAS (CAP)



PEK. PASANG UDITCH



PEK. PEMBERSIHAN BEKAS GALIAN



PEK. PASANG PAVING

B. Reviu

Reviu adalah penilaian formal/pemeriksaan sesuatu dengan kemungkinan melakukan perubahan jika diperlukan. Tujuan dasar dalam pelaksanaan reviu adalah untuk memberikan sedikit gambaran informasi serta gagasan yang dapat membantu untuk memudahkan mendapatkan informasi. Pada Semester II Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan reviu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu Reviu LPPD, Reviu RKPD, Reviu LKPD, Reviu DAK, dan Reviu Renstra, Reviu RKA, Reviu RKA Perubahan, Reviu KUA PPAS, Reviu KUA PPAS Perubahan, Reviu Renja, dan Reviu LKjIP sebagaimana tergambar pada tabel-tabel berikut :

I. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil reviu ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengujian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan hasil reviu penelusuran angka atas penyajian saldo akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Lampiran Pendukung, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akhir retribusi daerah dengan lampiran pendukung.
- 2) Terdapat realisasi belanja yang melebihi anggaran dalam LRA dan lampiran pendukung.

Berdasarkan hasil reviu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo akhir beberapa akun pendapatan daerah dengan dalam CaLK.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Pengujian Penyajian Neraca

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Neraca, terdapat selisih dalam pengujian Aset Tetap Akhir di Neraca dengan Aset Tetap Akhir di Laporan Barang Milik Daerah (lampiran pendukung).

Berdasarkan hasil revidu penelusuran angka atas saldo akun Neraca dengan Lampiran Pendukung, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian saldo akhir beberapa akun Neraca dengan Lampiran dan CaLK.
- 2) Terdapat saldo akhir pada on face tidak didukung secara memadai dengan lampiran.

Berdasarkan hasil revidu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun Neraca dalam CaLK.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Neraca tertuang dalam Catatan Hasil Revidu (CHR) terlampir.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Pengujian Penyajian Laporan Arus Kas (LAK)

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Laporan Arus Kas (LAK), terdapat selisih dalam pengujian saldo akhir kas di BUD dengan perhitungan saldo awal kas BUD dan kenaikan/penurunan kas sebesar Rp45.328.300,90. Selisih ini merupakan jumlah koreksi atas SILPA Tahun Lalu (LAK).

Berdasarkan hasil revidu atas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), terdapat ketidaksesuaian penyajian saldo beberapa akun Laporan Arus Kas (LAK) dalam CaLK.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Operasional (LO) tertuang dalam Catatan Hasil Revidu (CHR) terlampir.

d. Pengujian Penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), terdapat selisih dalam pengujian penggunaan SAL tahun berjalan dengan SAL Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp45.328.300,90. Selisih ini merupakan jumlah koreksi atas SILPA Tahun Lalu.

Uraian selengkapnya mengenai pengujian penyajian Laporan Operasional (LO) tertuang dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) terlampir.

e. Pengujian Keterhubungan antar Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil Prosedur Analitis atas Keterhubungan antar Komponen Laporan Keuangan, didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) Pada uji keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, yaitu
 - Terdapat selisih pada pengujian Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) tercermin dalam penambahan nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca) untuk metode harga perolehan sebesar Rp99,496,932,050.39.
 - Terdapat selisih pada pengujian saldo realisasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dan aset lainnya (aset tidak berwujud), yaitu untuk aset Tanah sebesar Rp146,260,323,918.57; Peralatan dan Mesin sebesar Rp4,184,943,614.88; Gedung dan Bangunan sebesar Rp135,511,898,124.96; Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp41,845,247,805.36; Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15,156,108,452.00 serta Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) sebesar Rp5,698,951,684.00.
- 2) Pada uji keterhubungan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), yaitu terdapat selisih pada pengujian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi (LAK) dengan Belanja Modal (LRA) sebesar Rp100.000.000.000,00.
- 3) Pada uji keterhubungan antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK), yaitu terdapat selisih pada pengujian saldo Utang PFK tahun berjalan (Neraca) dengan saldo perhitungan Utang PFK tahun sebelumnya (Neraca), Penerimaan PFK (LAK) dan Pengeluaran PFK (LAK) sebesar Rp60.728.160,90.
- 4) Pada uji keterhubungan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, yaitu:

- Terdapat selisih pada pengujian saldo Pendapatan (LO) dengan saldo perhitungan Pendapatan (LRA), Piutang (Neraca) dan Pendapatan Diterima Dimuka (Neraca), yaitu atas Pendapatan Pajak sebesar Rp132.518.400,00; Pendapatan Retribusi sebesar Rp6.553.846,15; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp99.496.932.050,39; Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.857.369.511,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp100.033.909.695,00; serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp306.526.789.958,94.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Pegawai (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Pegawai (LRA) dan Utang Pegawai (Neraca) sebesar Rp130.295.049,01.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Barang dan Jasa LO dengan saldo perhitungan Belanja Barang dan Jasa (LRA), Persediaan (Neraca), Beban Dibayar Dimuka (Neraca), dan Utang Barang dan Jasa (Neraca) sebesar Rp73.783.171.070,17. - Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Bantuan Sosial (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Bantuan Sosial (LRA) dan Utang Bantuan Sosial (Neraca) sebesar Rp4.609.900.000,00.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Hibah (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Hibah (LRA) dan Utang Hibah (Neraca) sebesar Rp168.450.508.587,35.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Transfer (LO) dengan saldo perhitungan Belanja Transfer (LRA) dan Utang Transfer (Neraca) sebesar Rp5,10.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Penyusutan (LO) dengan saldo penambahan Akumulasi Penyusutan (Neraca), yaitu atas Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.163.724.831,57; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.889.879.047,00; Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp20.092.908.572,02; Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar 464.382.802,00.

- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Amortisasi (LO) dengan saldo penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Neraca) sebesar Rp1.912.736.329,00.
- Terdapat selisih pada pengujian saldo Beban Penyisihan Piutang (LO) dengan saldo perhitungan Penyisihan Piutang Akhir Tahun dan Penyisihan Piutang Awal Tahun (Neraca) sebesar Rp35.726.436.476,62.

Berdasarkan hasil reviu penelusuran angka atas keterhubungan saldo akun Laporan dengan Lampiran Pendukung, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian saldo belanja modal peralatan dan mesin pada LRA dengan penambahan aset tetap dari belanja modal pada lampiran pendukung dan CaLK
- 2) Terdapat ketidaksesuaian jumlah Koreksi Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek bagian Utang Belanja Pegawai pada lampiran pendukung.
- 3) Terdapat ketidaksesuaian saldo Beban Penyusutan pada Laporan Operasional dan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada lampiran pendukung dan CaLK.

Rekomendasi

Melakukan pencermatan kembali atas penyajian akun dalam lampiran pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester II Tahun 2023

Keterangan	Jumlah	Keterangan
Jumlah obyek yang seharusnya di reviu	1	Dokumen LKPD Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022
Jumlah obyek yang di reviu	1	
Obyek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	1	
Obyek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	-	-

II. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dengan rincian alokasi sebagai berikut:

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.083.959.425.891,00
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.080.423.014.067,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.020.335.169.913,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.020.335.169.913,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60.087.844.154,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60.087.844.154,00
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	2.568.752.024,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.568.752.024,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.568.752.024,00
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	967.659.800,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	967.659.800,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	967.659.800,00
	DINAS KESEHATAN	595.677.466.420,00
	DINAS KESEHATAN	263.606.140.250,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	263.606.140.250,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	263.606.140.250,00
	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	5.613.004.616,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	613.283.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	613.283.000,00
X	-	4.999.721.616,00
X.XX	-	4.999.721.616,00

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	10.323.657.094,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	518.000.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	518.000.000,00
X	-	9.805.657.094,00
X.XX	-	9.805.657.094,00
	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	3.872.599.322,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	1.482.834.098,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.482.834.098,00
X	-	2.389.765.224,00
X.XX	-	2.389.765.224,00
	RSUD BALI MANDARA	196.341.698.500,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00
X	-	196.341.698.500,00
X.XX	-	196.341.698.500,00
	RUMAH SAKIT JIWA	36.756.354.754,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00
X	-	36.756.354.754,00
X.XX	-	36.756.354.754,00
	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	72.000.000.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	72.000.000.000,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	72.000.000.000,00
	UPTD LABOTARIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL	7.164.011.884,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR	2.784.960.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.784.960.800,00
X	-	4.379.051.084,00
X.XX	-	4.379.051.084,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		406.505.896.546,00
UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN		3.963.187.050,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.963.187.050,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.963.187.050,00
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM		29.018.411.568,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.018.411.568,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.018.411.568,00
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH		11.064.918.400,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.064.918.400,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.064.918.400,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		362.459.379.528,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	362.151.189.528,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	356.959.379.528,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.191.810.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	308.190.000,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	308.190.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		50.133.628.066,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		50.133.628.066,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	49.980.628.066,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	49.980.628.066,00
X	-	153.000.000,00
X.XX	-	153.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		36.814.639.658,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		28.188.950.892,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	28.188.950.892,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.188.950.892,00
UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH		8.625.688.766,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.625.688.766,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.625.688.766,00
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK		34.900.251.340,00
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK		30.640.841.540,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.981.743.840,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.981.743.840,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	659.097.700,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	659.097.700,00
UPTD PELAYANAN SOSIAL		3.736.582.016,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.736.582.016,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.736.582.016,00
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		522.827.784,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	522.827.784,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	522.827.784,00
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		32.674.910.456,00
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA		1.017.961.272,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.017.961.272,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.017.961.272,00
	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	698.319.164,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	698.319.164,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	698.319.164,00
	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	30.958.630.020,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	30.731.130.520,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.731.130.520,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	227.499.500,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	202.499.500,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	25.000.000,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.356.480.677,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25.356.480.677,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.356.480.677,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.010.364.891,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.535.409.910,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	810.705.876,00
	DINAS PERHUBUNGAN	40.944.900.914,00
	DINAS PERHUBUNGAN	26.710.454.630,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	26.710.454.630,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.710.454.630,00
	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ	2.567.481.476,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.567.481.476,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.567.481.476,00
	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA	8.492.679.500,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.492.679.500,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.492.679.500,00
	UPTD PERLENGKAPAN JALAN	2.050.355.348,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.050.355.348,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.050.355.348,00
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	1.123.929.960,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.123.929.960,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.123.929.960,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	51.271.425.368,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	51.271.425.368,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	51.271.425.368,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.189.205.368,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	504.220.000,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	578.000.000,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.109.434.752,00
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18.553.299.784,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.553.299.784,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.553.299.784,00
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	556.134.968,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	556.134.968,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	556.134.968,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.467.325.355,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.467.325.355,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.442.325.355,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.442.325.355,00
X	-	25.000.000,00
X.XX	-	25.000.000,00
	DINAS KEBUDAYAAN	171.744.699.471,00
	DINAS KEBUDAYAAN	104.445.112.679,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	104.445.112.679,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	104.445.112.679,00
	UPTD TAMAN BUDAYA	41.156.925.184,00
X	-	41.156.925.184,00
X.XX	-	41.156.925.184,00
	UPTD MUSEUM BALI	11.881.788.636,00
X	-	11.881.788.636,00
X.XX	-	11.881.788.636,00
	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI	14.260.872.972,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	35.000.000,00
X	-	14.225.872.972,00
X.XX	-	14.225.872.972,00
	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	482.218.721.241,00
	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	482.218.721.241,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	482.218.721.241,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	482.218.721.241,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.201.969.657,00
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.404.478.164,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	24.384.478.164,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.384.478.164,00
X	-	20.000.000,00
X.XX	-	20.000.000,00
	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	881.161.480,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	881.161.480,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	881.161.480,00
	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1.133.196.896,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.133.196.896,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.133.196.896,00
	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	1.342.079.617,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.303.898.417,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.303.898.417,00
X	-	38.181.200,00
X.XX	-	38.181.200,00
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN	441.053.500,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	441.053.500,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	441.053.500,00
	DINAS PARIWISATA	21.550.026.440,00
	DINAS PARIWISATA	21.550.026.440,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.550.026.440,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	21.550.026.440,00
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	71.908.217.596,00
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	60.249.449.994,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.335.591.288,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.335.591.288,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	58.913.858.706,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	58.913.858.706,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	1.926.518.998,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.297.290.134,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.297.290.134,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	629.228.864,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	629.228.864,00
	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	3.698.693.636,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.698.693.636,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.698.693.636,00
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	2.924.191.236,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.924.191.236,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.924.191.236,00
	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	3.109.363.732,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.109.363.732,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.109.363.732,00
	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	47.492.017.131,00
	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	39.668.370.972,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	512.829.480,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	512.829.480,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.155.541.492,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	39.155.541.492,00
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA	846.013.893,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	846.013.893,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	846.013.893,00
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR	639.899.980,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	639.899.980,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	639.899.980,00
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN	494.136.042,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	494.136.042,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	494.136.042,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT	379.299.240,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	379.299.240,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	379.299.240,00
	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI	184.300.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	184.300.000,00
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	184.300.000,00
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	423.400.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	423.400.000,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	423.400.000,00
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH	4.856.597.004,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.856.597.004,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.856.597.004,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	22.792.092.480,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.274.748.708,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.274.748.708,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.717.369.164,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	557.379.544,00
	UPTD RUMAH KREATIF	993.931.396,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	993.931.396,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	993.931.396,00
	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	523.412.376,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	523.412.376,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	523.412.376,00
	SEKRETARIAT DAERAH	190.666.750.147,00
	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	75.660.452.687,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	75.660.452.687,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	75.660.452.687,00
	BIRO HUKUM	7.070.903.556,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	5.008.516.192,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	5.008.516.192,00
X	-	2.062.387.364,00
X.XX	-	2.062.387.364,00
	SEKRETARIAT DAERAH	87.254.374.484,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	570.198.832,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	86.684.175.652,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	86.684.175.652,00
	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.311.037.374,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	13.311.037.374,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	13.311.037.374,00
	BIRO ORGANISASI	3.175.145.924,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	628.093.064,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	628.093.064,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	622.697.688,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	622.697.688,00
X	-	1.924.355.172,00
X.XX	-	1.924.355.172,00
	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN	4.194.836.122,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.040.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.040.000.000,00
X	-	3.154.836.122,00
X.XX	-	3.154.836.122,00
	SEKRETARIAT DPRD	249.314.038.394,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	SEKRETARIAT DPRD	249.314.038.394,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	248.332.048.394,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	248.332.048.394,00
X	-	981.990.000,00
X.XX	-	981.990.000,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.485.902.928,00
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.485.902.928,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.485.902.928,00
5.01	PERENCANAAN	28.485.902.928,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.772.770.753.949,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.769.431.639.849,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.769.431.639.849,00
5.02	KEUANGAN	1.769.431.639.849,00
	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.339.114.100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.667.000.000,00
5.02	KEUANGAN	2.667.000.000,00
X	-	672.114.100,00
X.XX	-	672.114.100,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	165.684.897.131,00
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	137.145.218.857,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	137.145.218.857,00
5.02	KEUANGAN	137.145.218.857,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN BULELENG	5.491.535.507,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.041.516.659,00
5.02	KEUANGAN	4.041.516.659,00
X	-	1.450.018.848,00
X.XX	-	1.450.018.848,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN JEMBRANA	1.897.973.133,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.048.518.173,00
5.02	KEUANGAN	1.048.518.173,00
X	-	849.454.960,00
X.XX	-	849.454.960,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN TABANAN	2.291.957.956,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.020.555.204,00
5.02	KEUANGAN	1.020.555.204,00
X	-	1.271.402.752,00
X.XX	-	1.271.402.752,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN BADUNG	4.643.904.680,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.170.016.240,00
5.02	KEUANGAN	3.170.016.240,00
X	-	1.473.888.440,00
X.XX	-	1.473.888.440,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKOTA DENPASAR	4.793.774.039,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.075.276.495,00
5.02	KEUANGAN	3.075.276.495,00
X	-	1.718.497.544,00
X.XX	-	1.718.497.544,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN GIANYAR	3.206.682.222,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.979.207.366,00
5.02	KEUANGAN	1.979.207.366,00
X	-	1.227.474.856,00
X.XX	-	1.227.474.856,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATI F(RP)
1	2	3
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN BANGLI	2.047.343.584,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.118.968.728,00
5.02	KEUANGAN	1.118.968.728,00
X	-	928.374.856,00
X.XX	-	928.374.856,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN KLUNGKUNG	2.388.257.819,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	987.203.483,00
5.02	KEUANGAN	987.203.483,00
X	-	1.401.054.336,00
X.XX	-	1.401.054.336,00
	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DIKABUPATEN KARANGASEM	1.778.249.334,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	879.042.166,00
5.02	KEUANGAN	879.042.166,00
X	-	899.207.168,00
X.XX	-	899.207.168,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.261.149.707,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39.080.621.339,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.080.621.339,00
5.03	KEPEGAWAIAN	37.966.520.955,00
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	1.220.696.368,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.220.696.368,00
5.03	KEPEGAWAIAN	1.220.696.368,00
	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	6.959.832.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.959.832.000,00
5.03	KEPEGAWAIAN	6.959.832.000,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	22.374.352.871,00
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	22.374.352.871,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	22.374.352.871,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	22.374.352.871,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3
	BADAN PENGHUBUNG	8.678.749.909,00
	BADAN PENGHUBUNG	8.678.749.909,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.678.749.909,00
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.678.749.909,00
	INSPEKTORAT DAERAH	37.136.745.394,00
	INSPEKTORAT	37.136.745.394,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	37.136.745.394,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	37.136.745.394,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	185.439.235.189,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	185.439.235.189,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	185.439.235.189,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	185.439.235.189,00
	JUMLAH	5.948.536.105.078,00

Pengujian atas Penyusunan Substansi antar BAB Rancangan Akhir RKPD :

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, kesesuaian penyusunan substansi antar bab rancangan akhir RKPD Tahun 2024 telah sesuai, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKPD provinsi dan penyusunan rencana kerja telah sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD.
2. Penjelasan pengolahan data dan informasi untuk RKPD sudah sesuai dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Penjelasan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Bab III rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 secara umum sudah sesuai dengan amanat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Arah kebijakan dalam prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 telah sesuai dengan arah Kebijakan Nasional (RPJMN/RKP), yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
5. Perumusan RKPD telah sesuai dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

6. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 telah dirumuskan dengan mengacu/mendasarkan dan memperhatikan pada RPD dan RPJMN serta Konsistensi antara kebijakan pusat dengan daerah.
7. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan perumusan dadaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah mengacu pada rancangan RKP.
8. Berdasarkan hasil revidi atas terkait Pengujian atas Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan sistematika dokumen RKPD Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan tahapan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD dan rencana kerja dan pendanaan daerah secara umum telah selaras dengan program pembangunan daerah.
9. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang diuraikan dalam Bab IV RKPD dengan penjabaran sasaran pembangunan daerah dalam Bab V RPD telah selaras.
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah ditandatangani dan dilengkapi dengan lampiran – lampiran.

Rekomendasi

Atas permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan pencermatan kembali atas kesesuaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 dengan RPD Tahun 2024-2026 terkait:
 - perumusan program sesuai dengan Rencana Program Prioritas RPD di Tahun 2024,
 - indikator kinerja dan target kinerja program yang belum tercantum dalam Tabel Bab VI RKPD,
 - ketidaksesuaian pencantuman indikator kinerja dan target kinerja program dalam Tabel Bab VI RKPD,
 - program dan pencapaian targetnya di Tahun 2024 yang tidak memiliki dengan pagu indikatif Tahun 2024; serta
 - penyajian realisasi pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022 pada bab III RKPD.
2. Melakukan pencermatan kembali atas penyajian substansi/informasi dalam uraian atau tabel di Bab RKPD Tahun 2024.

III. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Catatan Hasil Reviu terhadap kesesuaian materi dan sistematika pelaporan serta kelengkapan dan validitas bukti pendukung yang telah diupload melalui Aplikasi SILPPD kemendagri, sebagai berikut :

- a. Materi dan sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 **telah disusun** berdasarkan pedoman teknis penyusunan LPPD.
- b. Capaian Kinerja IKK makro
Capaian Kinerja makro **Tidak Diperoleh Informasi (TDI)** mengingat data dukung belum diupload melalui Aplikasi SILPPD Kemendagri (IKK Makro masih dalam proses update data oleh BPS)
- c. Capaian Kinerja IKK Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Dari 113 (seratus tiga belas) IKK Outcome capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah diupload pada Aplikasi SILPPD masih terdapat 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum memadai, dengan rincian:
 - 1) Data dukung capaian kinerja belum lengkap sebanyak 15 (lima belas) IKK
 - 2) Data dukung belum disahkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang sebanyak 9 (sembilan) IKK
 - 3) Capaian kinerja tidak sesuai dengan data dukung sebanyak 5 (lima) IKK
 - 4) Capaian kinerja belum dilengkapi dengan data dukung (Tidak Diperoleh Informasi/TDI), sebanyak 1 (satu) IKK.

Kesimpulan

Kami sarankan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melengkapi dokumen pendukung yang sesuai dengan capaian kinerja dan disahkan/ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga kelengkapan bukti dukung serta validitas Indikator Kinerja Kunci (IKK) memadai.

IV. Reviu DAK

Berdasarkan hasil reviu Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler/ Penugasan Tahap III dan Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

DAK Fisik Reguler ada 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Sub Bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan
 - Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa)
 - Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas)
 - Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
 - Sub Bidang Kefarmasian
3. Bidang Jalan
 - Sub Bidang Jalan Reguler

DAK Fisik Penugasan ada 4 (empat) Bidang dan 5 (lima) Sub Bidang yaitu:

1. Bidang Jalan
 - Sub Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
 - Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah
2. Bidang Irigasi
 - Sub Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
3. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
4. Bidang Kehutanan
 - Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut :

Reguler :

1. Bidang Pendidikan
 - Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp4.694.945.152,- atau 99,86% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
 - Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp70.869.998,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SLB (Sekolah Luar Biasa) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.

- Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp14.059.438.875,- atau 99,23% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 99,69%.
 - Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp124.495.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA (Sekolah Menengah Atas) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
 - Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp16.077.846.975,- atau 99,78% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 99,93%.
 - Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp120.000.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
2. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
- Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Metode Sekaligus-Rekomendasi

- a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp0,- atau 0% dari dana yang telah diterima di RKUD.
- b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 0%.
- Sub Bidang Kefarmasian Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Kefarmasian Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp1.369.949.960,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Kefarmasian Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
- 3. Bidang Jalan
 - Sub Bidang Jalan Reguler Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Reguler Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp7.348.028.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Reguler Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.

Penugasan :

1. Bidang Jalan

- Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra industri Kecil dan Menengah Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra industri Kecil dan Menengah Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp.6.939.384.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra industri Kecil dan Menengah Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.

- Sub Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp7.086.256.000,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
- 2. Bidang Irigasi
 - Sub Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap II
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) Tahap II Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp.4.436.048.820,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap II Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
- 3. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan -Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan -Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap I Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp51.226.500,- atau 17,89% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap I Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
- 4. Bidang Kehutanan
 - Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp4.740.941.595,- atau 99,96% dari dana yang telah diterima di RKUD.

- b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.
 - Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Metode Sekaligus-Rekomendasi
 - a. Realisasi penyerapan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar Rp.379.846.830,- atau 100% dari dana yang telah diterima di RKUD.
 - b. Capaian Keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Metode Sekaligus-Rekomendasi Tahun Anggaran 2022, menurut hasil reviu sebesar 100%.

Uraian hasil evaluasi selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler/ Penugasan Tahap III dan Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor T.09.700/3503/IR.III/ITPROV.

V. Reviu RKA

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap RKA Tahun Anggaran 2024 pada Perangkat Daerah tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 telah didukung dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang memadai.
2. **Pada pengujian atas kesesuaian rencana program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKA Perangkat Daerah dengan PPAS**, secara umum rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah sesuai PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024
3. **Pada pengujian atas kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja, pagu anggaran, dan lokasi dalam rencana program, kegiatan dan subkegiatan RKA Perangkat Daerah dengan PPAS**, masih terdapat beberapa ketidakselarasan, yaitu terdapat beberapa indikator kinerja dan target capaian,

pagu anggaran, dan lokasi Sub Kegiatan yang tidak selaras antara RKA Tahun Anggaran 2024 dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

4. **Pada pengujian atas kewajaran alokasi anggaran**, secara umum alokasi anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
5. **Pada pengujian atas kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran**, secara umum pagu kegiatan dan sub kegiatan RKA Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 mencukupi untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan/ditargetkan. Namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian target keluaran Sub Kegiatan dengan rincian belanja yang berpotensi tidak tercapai target kinerjanya.
6. **Pada pengujian atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran**, secara umum RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai kaidah-kaidah penganggaran. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat pencermatan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdapat ketidakselarasan penganggaran belanja dengan Data Aset (KIB) atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yaitu:
 - Terdapat ketidakselarasan penganggaran Belanja Pemeliharaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - Terdapat ketidakselarasan penganggaran Belanja Modal dan Rencana Kebutuhan.
 - b. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
 - c. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Belanja Perjalanan Dinas, yaitu:
 - Terdapat ketidakselarasan penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- d. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Belanja Jasa untuk Tenaga Non ASN dan Tenaga Ahli, yaitu:
- Terdapat THR dan Iuran Jaminan untuk Sopir/Pengemudi belum dianggarkan.
 - Terdapat kekurangan/kelebihan Penganggaran Belanja Jasa berupa THR untuk Tenaga Administrasi.
 - Terdapat kelebihan penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
 - Terdapat Kelebihan Penganggaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi.
 - Terdapat ketidakselarasan penganggaran belanja jasa tenaga ahli.
 - Terdapat Kelebihan Penganggaran Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi.
 - Terdapat Tenaga Administrasi belum dianggarkan Belanja Iuran Jaminan Hari Tua
 - Terdapat Belanja Jasa untuk Tenaga Sopir belum dianggarkan dalam RKA Tahun Anggaran 2024
- e. Terdapat penganggaran belanja melebihi Standar Harga Satuan (SHS), yaitu:
- Terdapat penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas melebihi Standar Harga Satuan (SHS).
 - Terdapat ketidaksesuaian satuan harga spesifikasi belanja (pemeliharaan CCTV) dengan Standar Harga Satuan Barang.
 - Terdapat kelebihan penganggaran Belanja Banten Sehari-hari.
 - Terdapat ketidaksesuaian penganggaran Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemah (Pengganti Materi).
- f. Terdapat penganggaran belanja pemeliharaan melebihi batas kapitalisasi aset.
- g. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran belanja honorarium, yaitu:
- Terdapat ketidaksesuaian satuan uraian belanja dengan satuan honorarium dalam Pergub Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor.

- Terdapat ketidaksesuaian penganggaran honorarium petugas portal web pada Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.
- h. Terdapat Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan belum dianggarkan.
- i. Terdapat ketidaksesuaian penyajian rincian/uraian penganggaran, yaitu:
 - Terdapat ketidaksesuaian Kode Rekening Belanja dan uraian rincian/spesifikasi belanja.
 - Terdapat ketidakkonsistenan uraian satuan/koeffisien belanja.
 - Terdapat ketidaksesuaian uraian belanja antara Nama Barang dan Spesifikasi Barang.
 - Terdapat Koeffisien Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022. - Terdapat ketidaksesuaian penganggaran jumlah tenaga ASN yang dianggarkan dalam RKA dengan kondisi riil.
 - Terdapat ketidakselarasan Target Kinerja dari Hasil Sub Kegiatan dalam RKA dengan Uraian Rincian Belanja Sub Kegiatan.

VI. Reviu RKA Perubahan

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap RKA Perubahan Perangkat Daerah yang dijadikan sample tersebut diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 telah didukung dengan dokumen perencanaan dan anggaran yang memadai.
2. Pada pengujian atas kesesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA Perubahan Perangkat Daerah dengan PPAS Perubahan, Secara umum rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Lampiran Tabel pada Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

pada perangkat daerah sampel, yaitu : Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Badan dan Politik Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

3. Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian pencantuman indikator, target kinerja, dan pagu anggaran dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, secara umum rumusan pencantuman indikator kegiatan, target kinerja kegiatan, dan pagu anggaran pada RKA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 tersebut telah sesuai dengan Lampiran Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sampel yaitu : Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Badan dan Politik Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Namun masih terdapat catatan, yaitu :

- Terdapat ketidakkonsistenan pencantuman Lokasi Sub Kegiatan dalam RKA Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

- Terdapat target kinerja pada indikator dan tolok ukur kinerja tidak mencerminkan keluaran sub kegiatan pada indikator dan tolok ukur kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
 - Namun masih terdapat target keluaran belum selaras dengan kondisi real OPD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, OPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
4. Secara umum pagu kegiatan dan sub kegiatan RKA Perubahan Perangkat Daerah sampel Tahun Anggaran 2023 mencukupi untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan seperti pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 5. Pada pengujian atas kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Secara umum RKA Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai kaidah-kaidah penganggaran seperti pada Inspektorat, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Namun masih terdapat catatan yaitu :

- Terdapat koefisien belanja langganan/surat kabar/majalah yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Bali.
- Terdapat ketidaksesuaian uraian belanja antara nama barang dan spesifikasi barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Bali.
- Terdapat penganggaran belanja pemeliharaan perlu mendapatkan pencermatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi disebutkan bahwa, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya.
 - b. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 3. Bertambah volume, dan/atau
 4. Bertambah kapasitas produksi Dalam RKA terdapat penganggaran belanja pemeliharaan. Untuk itu perlu dilakukan pencermatan terhadap kriteria kedua terkait manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara agar tidak terjadi kesalahan pos penganggaran.
- Terdapat ketidaksesuaian penganggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dengan standar harga satuan pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
- Terdapat ketidaksesuaian kode rekening dengan spesifikasi belanja pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali
- Terdapat penganggaran belanja bahan-bahan bakar dan pelumas tidak pada Sub Kegiatan Sekretariat SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali

- Terdapat penggaran belanja hibah penerima hibah belum di cantumkan alamat penerima hibah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Setelah dikonfirmasi, diperoleh informasi bahwa tidak munculnya alamat penerima disebabkan karena adanya keterbatasan karakter yang ditampilkan pada aplikasi.
- Terdapat target sub kegiatan belum mencerminkan target yang akan dicapai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Terdapat penggaran belanja modal belum berdasarkan usulan RKBMD pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Hasil konfirmasi dengan pengurus barang, hal ini sudah diusulkan kedalam RKBMD Perubahan 2023, namun dimasukkan dalam Hard Disk Internal.
- Terdapat ketidakseragaman item harga ATK jenis sama pada Sub Kegiatan yang berbeda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Mencermati kembali belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa melebihi batas kapitalisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi disebutkan bahwa, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa overhaul dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria.
- Mencermati kembali harga satuan uraian Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- Mencermati kembali harga satuan uraian Belanja Pemeliharaan CCTV pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- Mencermati kembali uraian dan jumlah pengadaan belanja modal berdasarkan RKBMD Pengadaan untuk Belanja Modal camera conference/camera digital pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
- Mencermati kembali kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa khususnya belanja modal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.

- Terdapat penganggaran Honorarium Administrator Portal Web, Honorarium Operator Admin Face Detector, Honorarium Operator Face Face Detector, Honorarium SIEP tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- Terdapat target keluaran belum selaras dengan kondisi real OPD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- Pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan (2.17.07.1.01). Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja. Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi. dan Pengentasan Kemiskinan (2.17.07.1.01.01). Pada Uraian Kegiatan Honorarium Panitia agar dalam merealisasikan kegiatan agar mengacu pada Perpres 33 Tahun 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

VII. Reviu KUA PPAS

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan KUA dan PPAS

Dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan reviu rancangan KUA PPAS :

No	Kelengkapan Dokumen	Catatan Reviu	
		Ada	Tidak
1	Perkada RKPD;	Ada	
2	Rancangan KUA Dan PPAS;	Ada	
3	Analisis standar belanja;	Ada	
4	Standar harga satuan;	Ada	

2. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan KUA-PPAS Dengan Rancangan Akhir RKPD

- a. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam rancangan KUA telah sesuai dengan BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD
- b. perbandingan klasifikasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah KUA PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	RKPD (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	5.041.197.053.961,00	5.041.197.053.961,00	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.547.130.530.639,00	3.547.130.530.639,00	sesuai
4.2	Pendapatan Transfer	1.438.358.523.322,00	1.438.358.523.322,00	sesuai
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.708.000.000,00	55.708.000.000,00	sesuai
5	BELANJA DAERAH	5.974.836.303.027,00	5.974.836.303.027,00	
5.1	Belanja Operasi	3.898.285.424.883,82	3.898.285.424.883,82	sesuai
5.2	Belanja Modal	565.543.051.534,00	565.543.051.534,00	sesuai
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	sesuai
5.4	Belanja Transfer	1.461.007.826.609,18	1.461.007.826.609,18	sesuai
	Surplus / (Defisit)			sesuai
	Persentase			sesuai
6	PEMBIAYAAN DAERAH	933.639.249.066,00	933.639.249.066,00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.182.556.262.418,00	1.182.556.262.418,00	sesuai
6.1	Pengeluaran Pembiayaan	248.917.013.352,00	248.917.013.352,00	sesuai

c. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD. Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian rancangan KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, dapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup memadai
2. Rancangan KUA telah sesuai dengan BAB IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD.
3. Rancangan KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 secara umum telah mengacu pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, terkait program, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran perangkat daerah
4. Proyeksi kapasitas fiskal tahunan antara rancangan KUA PPAS secara umum telah sesuai dengan Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam RKPD
5. Rancangan KUA PPAS secara umum telah sesuai dengan kaidah penganggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

VIII. Reviu KUA PPAS Perubahan

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai
- b. Dalam Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, pada Tabel 5.1 Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 agar ditambahkan kolom Meningkatkan/ Menurun

c. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disusun berdasarkan Perubahan RKPD. Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian rancangan Perubahan KUA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dalam Sub Bab 3.2 Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah telah menyajikan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah namun terdapat ketidaksesuaian dengan penyajian pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan Perubahan PPAS	Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan	Keterangan
1	2	3	4
1	Lingkungan Hidup	Pangan, Sandang dan Papan	Tidak Sesuai
2	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Pariwisata	Tidak Sesuai
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sesuai
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sesuai
5	Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur	Tidak Sesuai
6	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Kesehatan dan Pendidikan	Tidak Sesuai
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tidak Sesuai

2. Secara umum indikator dan target sub kegiatan yang tercantum pada Rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 telah selaras dengan Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, namun tidak dapat dilakukan pengujian kesesuaian indikator dan target program dan kegiatan. Hal ini disebabkan dalam Lampiran Rancangan Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 tidak menyajikan informasi indikator dan target kinerja program dan kegiatan.

IX. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Simpulan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali yang meliputi penelaahan terhadap format, Penelaahan terhadap mekanisme penyusunan dan Penelaahan terhadap substansi, adalah sebagai berikut :

a. Penelaahan terhadap format :

- 1) Format Laporan LKjIP Provinsi Bali telah menguraikan penjelasan umum organisasi (Pemerintah Provinsi Bali), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- 2) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah;
- 3) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah memuat Target Kinerja Pemerintah Provinsi Bali dan Target Pencapaian Realisasi Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Bali, namun masih terdapat penetapan target kinerja terlalu tinggi sehingga dalam realisasinya tidak bisa mencapai atau tercapai lebih kecil dari target yang ditetapkan, antara lain : •Nilai tukar petani, target 105 realisasi 93,40 •Nilai tukar nelayan, target 117,9 realisasi 101,50 •Rata-rata lama sekolah, target 10,56 realisasi 9,06 •Tingkat partisipasi angkatan kerja, target 76,30 realisasi 73,64 •Pertumbuhan ekonomi, target 6,60 realisasi 4,52
- 4) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah memuat Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, dan Capaian Realisasi Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Bali yang memadai;

- 5) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah menyajikan lampiran yang mendukung pada badan laporan;
 - 6) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
 - 7) Dokumen LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah menyajikan akuntabilitas keuangan.
 - 8) Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 - 9) Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, namun masih ditemukan indikator kinerja yang belum terukur.
 - 10) Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
 - 11) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
 - 12) Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
 - 13) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - 14) Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
 - 15) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan.
 - 16) Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
- b. Penelaahan terhadap mekanisme penyusunan.
- 1) LKjIP Pemerintah Provinsi Bali disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu, dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
 - 2) Informasi yang disampaikan dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan data yang memadai.
 - 3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKjIP Pemerintah Provinsi Bali.

- 4) Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
 - 5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah dapat diyakini keandalannya.
 - 6) Analisis/penjelasan dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah diketahui oleh unit kerja terkait.
 - 7) LKjIP Pemerintah Provinsi Bali merupakan gabungan partisipasi dari Unit Kerja/OPD dibawahnya.
- c. Penelaahan terhadap substansi.
- 1) Tujuan/sasaran dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;
 - 2) Tujuan/sasaran dalam LKj telah dilengkapi dengan indikator dan target keberhasilan.
 - 3) Tujuan/sasaran dalam LKj telah berorientasi hasil.
 - 4) Tujuan/sasaran dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK);
 - 5) Tujuan/sasaran dalam LKjIP Pemerintah Provinsi Bali telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - 6) Perjanjian kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja/tugas fungsi;
 - 7) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
 - 8) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
 - 9) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala;
 - 10) Indikator Kinerja Sasaran Strategis telah memenuhi kriteria SMART dan cukup, namun masih ditemukan indikator kinerja yang belum terukur atau berorientasi outcome, yaitu sasaran strategis Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global dengan indikator kinerja jumlah devisa sektor pariwisata.

X. Reviu atas Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Reviu ini terutama ditujukan untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen. Berdasarkan hasil Reviu atas data/dokumen yang diperoleh, kami berpendapat bahwa Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada Tahap Pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan dan telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Terdapat ketidaksesuaian harga satuan bahan yang tercantum pada Analisa Pekerjaan dibandingkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021;
- 2) Terdapat Perbedaan analisa uraian Pekerjaan “Blockboard 18 mm” pada Pekerjaan Arsitektur Menara tidak sesuai lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Terdapat kelebihan perhitungan Koefisien pada Analisa pekerjaan “Pemasangan 1 m² langit-langit Kalsiboard” pada Pekerjaan Arsitektur Menara;
- 4) Terdapat Nilai terkoreksi untuk harga Bahan Pekerjaan Struktur sebesar Rp190.304.684,24 dari total AHSP sebesar Rp 111.386.840.163,19 menjadi sebesar Rp111.196.535.478,95
- 5) Terdapat Nilai terkoreksi untuk harga Bahan dan Koefisien Analisa pada Pekerjaan Arsitektur sebesar Rp226.369.691,40 dari total AHSP sebesar Rp32.221.917.252,82 menjadi sebesar Rp31.995.547.561,42
- 6) Terdapat Harga Satuan Pekerjaan pada BOQ yang belum didukung dengan Analisa Biaya sebagai dasar dalam pembentukan harga satuan pekerjaan;

- 7) Terdapat rincian BOQ untuk Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi (SMKK) belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Terdapat harga satuan Swab Antigen tidak sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan selisih sebesar Rp210.600.000
- 9) Dari sampling Pekerjaan yang dilakukan Reviu yaitu pada pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur dan untuk BOQ SMKK pada Komponen Alat Rapid Test (Swab Antigen) dari total nilai AHSP/BOQ **sebesar Rp143.878.757.416.010 menjadi sebesar Rp143.251.483.040,37 atau terkoreksi sebesar Rp627.274.375,64 (Enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh empat sen)** dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai AHSP/BOQ	Nilai Hasil Koreksi	Nilai Terkoreksi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pek. Struktur	111,386,840,163.190	111,196,535,478.95	190,304,684.24
2	Pek. Arsitektur	32,221,917,252.82	31,995,547,561.42	226,369,691.40
3	SMKK (Swab Antigen)	270,000,000.00	59,400,000.00	210,600,000.00
Total		143,878,757,416.010	143,251,483,040.37	627,274,375.64

XI. Reviu atas Harga Perkiraan Sendiri pada Pekerjaan Penataan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih

Sesuai dengan hasil reviu HPS dan pencermatan pada dokumen pendukung atas persiapan pengadaan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Penataan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam melaksanakan paket pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Penataan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih) telah berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor: DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, tanggal 10 Juli 2023;

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan syarat-syarat umum kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada tanggal 21 Agustus 2023, dan pemberian uang muka sebesar 30% telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Rancangan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen telah menetapkan Rancangan Kontrak pada tanggal 21 Agustus 2023 namun pada pasal 7 angka 3 untuk Manajemen Kontruksi agar disesuaikan dengan Jenis Jasa Konsultan yang sudah berproses, serta pada pasal 10 angka 2 agar dipertegas % (persentase) pembayaran prestasi pekerjaan untuk setiap termin;
- 4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah Menetapkan HPS untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Penataan Area Bencingah dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih dengan Total Nilai sebesar Rp4.418.014.000,00 (empat milyar empat ratus delapan belas juta empat belas ribu rupiah), dan terdapat beberapa item pekerjaan yang perlu dilakukan evaluasi atas kesesuaian perhitungan dalam Pembentukan harga satuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	HPS AWAL (Rp.)	TERKO REKSI (Rp.)	SELISI H (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)	15.275.000,00	15.275.000,00	-
B	Pekerjaan Akses Keluar Pura Penataran Agung	866.020.559,90	851.902.665,87	14.117.894,03
C	Pekerjaan Area Catus Pata Bencingah	279.069.570,80	274.288.177,21	4.781.393,59
D	Pekerjaan Area Ulun Setra	49.359.010,11	47.395.855,62	1.963.154,49
E	Pekerjaan Gedung Sampah	1.362.604.418,72	1.352.947.194,90	9.657.223,82
F	Pekerjaan Toilet Umum	671.500.573,71	665.198.767,01	6.301.806,70
G	Pekerjaan Manuver	132.116.330,61	130.624.389,82	1.491.940,79
H	Pekerjaan Penataan Bundaran	139.803.907,23	136.234.962,73	3.568.944,50
I	Pekerjaan Pedestrian Dan Drainase	464.443.564,20	464.443.564,20	-
	JUMLAH	3.980.192.935,28	3.923.035.577,36	41.882.357,92
	PPN 11%	437.821.222,88	431.533.913,51	4.607.059,37
	TOTAL	4.418.014.158,15	4.354.569.490,87	46.489.417,29
	DIBULATKAN	4.418.014.000,00	4.354.569.000,00	46.489.000,00

- 5) Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh PPK bahwa untuk Upah Pekerja menggunakan perhitungan upah minimum sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 869/03-M/HK/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, sejumlah Rp 2.730.264,15/ perbulan. Dan Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2028 Pasal 19; ayat a menyatakan bahwa: “Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima), sehingga disarankan agar dari perhitungan hasil reviu dengan harga satuan Rp100.000 OH direalisasikan kedalam Perhitungan Analisa Biaya menjadi Rp109.210,57 OH;
- 6) Dari total nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK sebesar Rp4.418.014.000,00 terkoreksi menjadi Rp4.354.569.000,00 atau selisih sebesar Rp46.489.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebelum dikurangi dengan hasil koreksi dari upah pekerja dari perhitungan Rp100.00 OH menjadi Rp109.210,57 OH

XII. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA)

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.
2. **Pada pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).**

Secara umum pencantuman nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah sesuai dan mengacu pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, namun masih terdapat beberapa catatan yaitu :

- a. **Terdapat ketidaksesuaian pencantuman pagu indikatif Urusan dan atau kegiatan dan atau sub kegiatan** pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, yaitu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

- b. **Terdapat ketidaksesuaian pencantuman indikator kegiatan dan atau sub kegiatan** pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024, yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
 - c. **Terdapat ketidaksesuaian pencantuman target kegiatan dan atau sub kegiatan** pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
 - d. **Terdapat ketidaksesuaian pencantuman kode rekening program** pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
 - e. **Terdapat ketidaksesuaian uraian nama program** pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
3. **Pada pengujian atas penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.**

Secara umum rumusan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan, namun masih terdapat catatan atas tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. **Terdapat Ketidakkonsistenan Pencantuman Isu Strategis dan atau Tujuan dan atau Sasaran Perangkat Daerah antara Renja dan Renstra** pada Badan

Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

- b. **Terdapat Kegiatan dalam Renja Tahun 2024 tidak termuat dalam Renstra** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- c. **Terdapat ketidakselarasan nama Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024** pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
- d. **Terdapat ketidaksesuaian penyajian Sub Kegiatan antara uraian Bab III dan Lampiran Tabel Bab IV Program, Kegiatan, Pagu Anggaran, Indikator dan Target Kinerja** pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bali.
- e. **Terdapat pencantuman peraturan perundang-undangan belum diperbaharui/ dicantumkan dan tidak sesuai ketentuan**, yaitu pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Irbanwil III | LHR Renja Perangkat Daerah 30 Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Badan Penghubung Provinsi Bali, Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali (untuk Renja Sekretariat Daerah).

C. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh dan bisa juga bahwa Monitoring dan Evaluasi itu adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan/membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

1. Evaluasi Maturitas SPIP

Laporan Hasil Evaluasi Peta Risiko T.A 2022 pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Pengujian atas kelengkapan administrasi dokumen Peta Risiko

Dokumen peta risiko Sekretariat DPRD Provinsi Bali yang disampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali hanya berupa format daftar identifikasi risiko operasional. Dokumen peta risiko minimal memuat :

- 1) cover
- 2) Kata Pengantar
- 3) Pendahuluan
- 4) Perbaikan Lingkungan Pengendalian
- 5) Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- 6) Rancangan Informasi dan Komunikasi
- 7) Rancangan Pemantauan, dan
- 8) Penutup
- 9) Lampiran (Kertas Kerja).

2. Pengujian dan Analisa terhadap Konteks Risiko

Penetapan konteks risiko merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan penilaian risiko. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Tujuan dari tahap penetapan konteks adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran/program/kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran/program/kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh pimpinan perangkat daerah, Dari hasil evaluasi, Sekretariat DPRD Provinsi Bali telah melakukan penetapan konteks risiko baik risiko strategis perangkat daerah maupun risiko operasional.

3. Pengujian dan Analisa terhadap Identifikasi Risiko

Dari 10 pernyataan risiko, terdapat kelemahan sebagai berikut :

1) Risiko Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum mengidentifikasi risiko strategis perangkat daerah

2) Risiko Operasional

Dari 10 pernyataan risiko operasional, terdapat beberapa kelemahan yaitu : terdapat perbedaan antara peta risiko yang dikirim ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan kertas kerja penilaian risiko kode risiko belum dicantumkan terdapat 10 pernyataan risiko yang diidentifikasi bukan merupakan pernyataan risiko sehingga analisa tahap berikutnya menjadi tidak relevan, baik untuk form yang bersangkutan maupun form selanjutnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Catatan
1	Mendapatkan Barang/Jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	Bagian Umum	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan dampak/akibat
2	Pakaian Dinas yang diterima oleh anggota DPRD kurang berkualitas	Bagian Umum	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan dampak/akibat
3	Pekerjaan Terhambat Karena Kendaraan (Mobil, Motor) Rusak/Mogok. Kinerja Aparatur Terhambat Disebabkan Oleh Perbaikan Gedung Kantor, Tidak Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Bagian Umum	Bukan merupakan pernyataan risiko karena didalamnya ada penyebab dan dampak
4	pelaksanaan pengesahan anggaran belanja pada APBD terlambat	Bagian Keuangan	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan dampak/akibat
5	Pelaksanaan rapat kerja dengan OPD atas laporan Masyarakat/Stake holder penjadwalannya tidak dapat dilakukan segera. Pelaksanaan Rapat Internal Komisi terkait dengan tindak lanjut rapat dengan OPD tidak dapat berjalan maksimal.	Bagian Umum	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan sebab/dampak

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Catatan
6	Jadwal Kegiatan DPRD kadang-kadang berubah	Bagian Persidangan	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan sebab
7	Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok, guna menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya dihimpun dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Pelaporan kegiatan reses beresiko kurang lancar tergantung dari tindak lanjut masing-masing staf pendamping reses mengumpulkan bukti pelaksanaan reses	Sub Koordinator Fasilitas Perda, Penganggaran, dan Pengawasan	Bukan merupakan pernyataan risiko karena didalamnya ada penyebab dan dampak
8	Rapat Pembahasan tentang laporan masyarakat dengan Pimpinan dan Anggota BK dan agenda sidang BK kadang-kadang molor	Bagian Persidangan	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan dampak/akibat
9	Terlambatnya penyusunan Laporan Kinerja DPRD karena AKD belum mengumpulkinerjanya	Bagian Persidangan	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan sebab
10	Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang diusulkan oleh AKD kepada Bapemperda maupun usul dari Gubernur. Penyusunan Propemperda beresiko tidak sesuai dengan jadwal/agenda DPRD, Pembahasan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan pengajuan usul dari Gubernur maupun DPRD. Pembahasan Peraturan Daerah beresiko tidak sesuai jadwal/agenda DPRD	Sub Koordinator Fasilitas Perda, Penganggaran, dan Pengawasan	Pernyataan risiko ini bukan merupakan risiko dan lebih kepada pernyataan sebab

4. Pengujian dan Analisa terhadap hasil Penilaian Risiko

Peta Risiko yang disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum dilakukan analisa risiko.

5. Pengujian dan Analisa Penentuan Risiko Prioritas

Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum menentukan risiko prioritas pada peta risiko yang disusun.

6. Pengujian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas hasil identifikasi risiko prioritas

Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum menyusun rencana tindak pengendalian (RTP) pada Peta Risiko Tahun 2023.

7. Pengujian rencana atas pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun

Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum menyusun rencana atas pengkomunikasian atas kegiatan pengendalian yang dibangun pada Peta Risiko Tahun 2023.

8. Pengujian rencana atas pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian yang dibangun

Sekretariat DPRD Provinsi Bali belum menyusun rencana atas pemantauan dan evaluasi atas kegiatan pengendalian yang dibangun pada Peta Risiko Tahun 2023.

2. Evaluasi PPRG

1. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng

1) Penguatan Komitmen

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan di antaranya: Bupati dan wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (decision makers) dilingkup aparatur Pemerintah Daerah. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, rountable dissusion atau mungkin melalui kegiatan “coffee morning”. Kegiatan ini bisa secara terus menerus dilaksanakan mengingat para pengambil keputusan sering sekali terjadi

permutasian (turn over) cukup tinggi di antara para pejabat lingkup Pemerintah Daerah.

Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki komitmen terhadap pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan telah dirancang Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan ditetapkannya Keputusan Bupati Buleleng Nomor 476/135/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng tahun 2022.

2) Penguatan Kebijakan

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender adalah merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA-PD. Sedangkan dalam sistem penganggaran dapat diterapkan dalam RKAPD yang responsif gender dengan melakukan analisis gender dan melampirkan dokumen responsif gender (gender budget statement/ pernyataan anggaran gender (GBS/PAG) pada RKA-PD yang akan diajukan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat perencana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana perangkat daerah dapat melakukan analisis gender dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) responsif gender dan menyusun anggaran responsif gender (GBS/PAG) pada RKA mereka.

Pemerintah Kabupaten Buleleng **belum melakukan penguatan** atas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG)

3) Penguatan Kelembagaan

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG pada Pemerintah Daerah adalah mendorong terbentuknya Kelompok

Kerja (Pokja) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG pada Pemerintah Daerah dan terbentuknya focal point di masing-masing perangkat daerah Pokja dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan keanggotaan terdiri para Kepala perangkat daerah, sedangkan focal point ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah masing-masing. Pokja dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran Pokja untuk menggerakkan perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran Pokja dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki Keputusan Bupati Buleleng Nomor 476/135/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng tahun 2022. Sedangkan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng **sudah** menetapkan Keputusan focal point.

4) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG pada Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di wilayahnya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Kemampuan-kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan capacity building dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan capacity building, koordinasi, serta advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung

pelaksanaan PUG, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG, seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan terkait PUG dan PPRG dari unsur Bappeda, Dinas dan 27 perangkat daerah lainnya serta **belum ada** SDM yang pernah **mengikuti TOT fasilitator PUG/PPRG.**

5) Penguatan Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sexdisaggregated data) menjadi sangat penting termasuk profil gender Pemerintah Daerah. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya “profil gender kabupaten”, “Daerah dalam angka” berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya. Untuk mendukung tersusunnya profil gender dan tersusunnya data terpilah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG. Sebagian besar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng **belum menyusun dan memiliki Data Terpilah.**

6) Penguatan Instrument PPG

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sendiri berbagai “tools” yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang Pemerintah Daerah harus dipersiapkan dalam

mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Provinsi.

7) Penguatan Partisipasi Masyarakat

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparans, akuntabel dan responsibel terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isuisu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan PUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (Pprg) Pada Pemerintah Kabupaten Badung.

1) Penguatan Komitmen

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan di antaranya: Bupati dan wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (decision makers) dilingkup aparatur Pemerintah Daerah. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, rountable dissusion atau mungkin melalui kegiatan “coffee morning”. Kegiatan ini bisa secara terus menerus dilaksanakan mengingat para pengambil keputusan sering sekali terjadi permutasian (turn over) cukup tinggi di antara para pejabat lingkup Pemerintah Daerah. Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki komitmen terhadap pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daeah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengeusutamaan Gender dan Keputusan Bupati Badung Nomor

5509/02/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Badung.

2) Penguatan Kebijakan

Penguatan kebijakan atas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten Badung dapat dilihat dari :

1. Ditetapkan Surat Edaran Bupati Badung Nomor 441.10/6202/DP2KBP3A yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk:
 - a) membuat SK Focal Point setiap tahun
 - b) menyusun program dan kegiatan yang responsif gender
 - c) membuat analisis. gender budget statement (GBS) dan term of reference (TOR) kegiatan
 - d) menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
2. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggaran Responsif Gender
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026
4. Dokumen Renstra Perangkat Daerah
5. Program Kegiatan dan Indikator Gender
6. Renstra Dinas P2KBP3A yang telah memuat hal-hal terkait isu Pengarusutamaan Gender

3) Penguatan Kelembagaan

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG pada Pemerintah Daerah adalah mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG pada Pemerintah Daerah dan terbentuknya focal point di masing-masing perangkat daerah. Pokja dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan keanggotaan terdiri para Kepala perangkat daerah, sedangkan focal point ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah masing-masing. Pokja dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran Pokja

untuk menggerakkan perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran Pokja dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki Pokja PUG berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 550/02/HK/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Badung. Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah membentuk SK focal point salah satu contoh pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2022

4) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG pada Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di wilayahnya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Kemampuan-kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan capacity building dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah

Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan capacity building, koordinasi, serta advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan

ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan PUG, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG, seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi.

Dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, diperoleh informasi bahwa:

1. masih terdapat perangkat daerah yang belum memiliki fasilitator internal perangkat daerah; dan
2. Pelaksana PPRG belum mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG.

5) Penguatan Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sexdisaggregated data*) menjadi sangat penting termasuk profil gender Pemerintah Daerah. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya “profil gender kabupaten”, “Daerah dalam angka” berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya. Untuk mendukung tersusunnya profil gender dan tersusunnya data terpilah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG. Sebagian besar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah menyusun dan memiliki Data Terpilah serta telah menggunakan metode analisis Gender Analisis Pathway (GAP).

6) Penguatan Instrument PPRG

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sendiri berbagai “tools” yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat provinsi seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang Pemerintah Daerah harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Provinsi

7) Penguatan Partisipasi Masyarakat

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparans, akuntabel dan responsible terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isuisu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan pUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

Dari hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Badung, diperoleh informasi bahwa masih terdapat perangkat daerah yang belum melibatkan LSM dalam pembahasan PUG atau isu gender.

4. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender(Pprg) Tahun 2021 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

1) Penguatan Komitmen

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan di antaranya: Bupati dan wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (decision makers) dilingkup aparatur Pemerintah Daerah. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, rountable dissusion atau mungkin melalui kegiatan “coffee morning”. Kegiatan ini bisa secara terus menerus dilaksanakan mengingat para pengambil keputusan sering sekali terjadi permutasian (turn over) cukup tinggi di antara para pejabat lingkup Pemerintah Daerah.

Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki komitmen terhadap pengarusutamaan gender dapat dilihat dengan telah dirancang Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan ditetapkannya Keputusan Bupati Bangli Nomor 476/371/2022 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bangli.

2) Penguatan Kebijakan

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender adalah merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomoir 67 Tahun 2011. Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA-PD. Sedangkan dalam sistem penganggaran dapat diterapkan dalam RKAPD yang responsif gender dengan melakukan analisis gender dan melampirkan dokumen responsif gender (gender budget statemnt/ pernyataan anggaran gender (GBS/PAG) pada RKA-PD yang akan diajukan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat perencana perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana perangkat daerah dapat melakukan anlisis gender dan menyusun dokumen

perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) responsif gender dan menyusun anggaran responsif gender (GBS/PAG) pada RKA mereka.

Pemerintah Kabupaten Bangli **belum melakukan penguatan** atas penyelenggaraan Pengausutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender (PPRG).

3) Penguatan Kelembagaan

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG pada Pemerintah Daerah adalah mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG pada Pemerintah Daerah dan terbentuknya focal point di masing-masing perangkat daerah. Pokja dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dengan keanggotaan terdiri para Kepala perangkat daerah, sedangkan focal point ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah masing-masing. Pokja dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran Pokja untuk menggerakkan perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG di Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran Pokja dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki Pokja PUG berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 476/371/2022 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bangli serta Keputusan Bupati Bangli Nomor 476/438/2022 tentang Tim Teknis Pelaksana Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangli. Sedangkan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli belum menetapkan Keputusan focal point.

4) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG pada Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di wilayahnya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai

kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Kemampuan-kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan *capacity building*, koordinasi, serta advokasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan PUG, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG, seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi.

Pemerintah Kabupaten Bangli telah memiliki sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan terkait PUG dan PPRG dari unsur Bappeda, Dinas dan 27 perangkat daerah lainnya serta **belum ada** SDM yang pernah **mengikuti TOT fasilitator PUG/PPRG.**

5) Penguatan Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) menjadi sangat penting termasuk profil gender Pemerintah Daerah. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrument untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya “profil gender kabupaten”, “Daerah dalam angka” berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya. Untuk mendukung tersusunnya profil gender dan tersusunnya data terpilah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG.

Sebagian besar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli **belum menyusun dan memiliki Data Terpilah.**

6) Penguatan Instrument PPRG

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sendiri berbagai “tools” yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang Pemerintah Daerah harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Provinsi.

7) Penguatan Partisipasi Masyarakat

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparans, akuntabel dan responsible terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isu- isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan PUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

3. Evaluasi ZI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Pemerintah Provinsi Bali, kami mengusulkan :

1. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 94,06 merupakan rujukan utama bagi pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Provinsi Bali dengan keunggulan layanan rehabilitasi berbasis budaya yaitu memulihkan jiwa

pasien yang mengalami gangguan kejiwaan dengan menggunakan kearifan lokal sebagai bentuk keterampilan vokasional. Beberapa inovasi yang mendukung layanan dimaksud adalah promosi kesehatan berbasis online (Gema Jiwa Santi), kunjungan daring serta didukung sistem informasi pelayanan (Si Pulih Jiwa).

2. UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 92,93 dan merupakan unit pelaksana kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan keunggulan antara lain keberhasilan mendorong masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak kendaraan secara Non Tunai, melaksanakan layanan Samsat Kerthi yang datang ke rumah tinggal masyarakat dan layanan Samsat Keliling yang mendapatkan respon positif dari masyarakat.

3. UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 91,51 dan merupakan unit pelaksana kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan berbagai keunggulan antara lain melalui Samsat Senggol (dimana masyarakat dapat membayar pajak sembari berbelanja dan berekreasi pada malam minggu di pasar senggol), layanan jemput bola melalui Samsat Kerti, terdepan dalam pendataan atas tunggakan pajak harian melalui kegiatan Door To Door, serta bersinergi dalam pembayaran pajak dengan desa melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sehat di Kabupaten Tabanan.

4. UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **89,73** dan merupakan unit pelaksana kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan berbagai keunggulan dalam pelayanan yaitu Si Eling (pengingat jatuh tempo), Samsat Gelis (drive thru),

Samsat Vast (pembayaran non tunai), Sipandu (Sinergi Pelayanan Terpadu), serta membangun bersinergi dalam pembayaran pajak dengan Bumdes, Kantor Pos, Kepolisian Resort Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **88,85** dan dengan keunggulannya adalah memanfaatkan teknologi informasi di segala lini untuk mempermudah ASN dalam mengakses layanan dan mengurangi interaksi langsung antara pemberi layanan dengan penerima layanan melalui berbagai aplikasi antara lain SIMPEG, SIMATA, SIKEPO, SIKA dan aplikasi *assessment centre*. Inovasi Digitalisasi dokumen kepegawaian juga mempermudah pegawai dalam melengkapi persyaratan layanan sehingga proses layanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat waktu. Penegakan integritas ditunjukkan dalam surat yang dikeluarkan oleh BKPSDM selalu mengumumkan tidak menerima gratifikasi dalam pelayanan.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar **88,45** dan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan keunggulan mengedepankan teknologi informasi bernama Prestise (E-Perizinan) yaitu sistem pelayanan berbasis website yang dikembangkan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan, mendorong peningkatan iklim usaha Bali berbasis UMKM dengan penerbitan 1000 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha tingkat risiko rendah perorangan serta penyusunan peta peluang investasi Bali.

4. Adhyasta Prajaniti

- a. Penghargaan Adhyasta Prajaniti Menuju Bali Era Baru merupakan penganugrahan Gubernur Bali atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam upaya mewujudkan pengelolaan manajemen pemerintahan yang bersih dan akutanbel.
- b. Dalam melakukan evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti Menuju Bali Era Baru telah dibentuk Tim Penilai baik internal (APIP) maupun dari unsur external (Akademisi, BPKP Perwakilan Bali dan Ombudsman Perwakilan Bali)
- c. Evaluasi/penilaian pemberian penghargaan Adhyasta Prajaniti Menuju Bali Era Baru dilakukan 3 (tiga) tahap untuk menentukan Perangkat Daerah terbaik, yaitu
 1. Tahap I (pertama), dilakukan penilaian administrasi dengan menggunakan variable/indicator berupa: jumlah temuan pembinaan paling sedikit, kecepatan melaksanakan tindaklanjut serta ketepatan dalam penyelesaian tindak lanjut, penilaian risiko perangkat daerah, penialian SAKIP, penilaian RB, serta penilaian mandiri SPIP. Output dari penilaian tahap I terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang lolos masuk nominasi ke tahap seleksi berikutnya (Tahap II).
 2. Tahap 2 (kedua), dilakukan visitasi terhadap 8 (delapan) Perangkat Daerah/nominator yang lulus dari tahap I, untuk memastikan kesesuaian tindak lanjutnya. Output dari penilaian tahap II adalah 5 (lima) Perangkat Daerah terbaik yang masuk nominasi ke tahap selesksi berikutnya (tahap III), yaitu **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali serta Biro Hukum Setda Provinsi Bali.**
 3. Penilaian Tahap III (ketiga) dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu :
 - Penilaian dilakukan dengan *self assessment* melalui evaluasi terhadap disiplin PNS, pengelolaan manajemen dan sistem pelaporan dengan sasaran penilaian sebagai berikut :

- 1) Penilaian atas disiplin pegawai masing-masing Perangkat Daerah
 - 2) Penilaian atas gaya kepemimpinan masing-masing Perangkat Daerah
 - 3) Penilaian atas hubungan kerja antara atasan dan bawahan masing-masing Perangkat Daerah
 - 4) Penilaian atas LHKPN masing-masing Perangkat Daerah
 - 5) Penilaian atas LHKASN masing-masing Perangkat Daerah
- Penilaian dilakukan oleh evaluator/assessor (BPKP, Ombudsmen dan akademi Universitas Udayana) melalui karya tulis dan wawancara. Tema karya tulis adalah “Inovasi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru”

Output dari penilaian Tahap III, dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan **Adhyasta Prajaniti** Menuju Bali Era Baru Tahun 2023 (I,II,III). Hasil penilaian sebagaimana daftar di bawah ini :

No	Perangkat Daerah	Nilai Rata-Rata	Peringkat
1	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	87,06	I
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	86,54	II
3	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	86,18	III
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali	84,98	IV
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali	83,88	V

4. Penerima Penganugerahan *Adhyasta Prajaniti* Menuju Bali Era Baru bagi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 terbaik I, II, dan III, akan diberikan berupa piagam penghargaan *Adhyasta Prajaniti* Menuju Bali Era Baru Tahun 2023
5. Acara penyerahan penghargaan *Adhyasta Prajaniti* Menuju Bali Era Baru bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 bertepatan dengan HUT Provinsi Bali ke-65.

5. Evaluasi Reformasi Birokrasi

A. Sasaran Strategis 1: Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel

No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian Tahun 2022
S1.	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	100%
S2.	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja dan fleksibilitas bekerja	N/A
S3.	Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBENasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBENasional	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBENasional	N/A
S4.	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A
			Indeks SAKIP	78,95
S5.	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Digital	N/A
S6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan-an Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	25%
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	Level 3 3,245
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	78,82
S7.	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A
S8.	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Nasional	N/A
S9.	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Baik 86,90
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100%

B. Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional

No	Sasaran Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Capaian Tahun 2022
1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat implementasi transformasi jabatan fungsional	100%
2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	N/A
3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai ASN	Tingkat implementasi peningkatan kapasitas pegawai ASN	N/A
4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Pelaksanaan rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan yang berlaku	N/A

5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	Pelaksanaan Transformasi digital manajemen ASN	Tingkat implementasi platform digital ekosistem manajemen ASN	N/A
6	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi pengelolaan kinerja pegawai ASN	100%
7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	330 Sangat Baik
		Pelaksanaan Core Values ASN	Survei Indeks BerAKHLAK	63
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	3,995 B

Beberapa baseline 2022 terisi N/A (not applicable) karena kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran belum melaksanakan evaluasi dan untuk target 2023- 2024 berstatus minimal Baik. Perangkat Daerah sebagai koordinator setiap kegiatan utama merupakan anggota dari Tim Reformasi Birokrasi General Provinsi Bali.

C. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali yaitu:

- 1) Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

D. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2022–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan.

Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya **penanganan stunting**.

4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi. PDN.

E. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

1. Monitoring Penyerapan Anggaran dan PBJ

a. Postur APBD

Berdasarkan hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Triwulan II TA. 2023, maka uraian hasil Reviu atas postur APBD sebagai berikut :

Tabel 1. Postur APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	%
I	PENDAPATAN DAERAH:	6.933.947.319.883,00	
1	PAD	4.731.419.182.089,00	68,24
2	Pendapatan Transfer	2.146.820.137.794,00	30,96
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.708.000.000,00	0,80
II	BELANJA DAERAH:	7.522.393.048.914,00	
1	BELANJA OPERASI :	4.360.987.718.569,00	57,973
	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779,00	27,552
	Belanja Barang/Jasa	1.366.532.146.443,00	18,166
	Belanja Subsidi	10.025.000.000,00	0,133
	Belanja Hibah	881.144.500.347,00	11,714
	Belanja Bansos	30.721.200.000,00	0,408
2	Belanja Modal	1.436.479.620.962,00	19,096
3	Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	0,21
4	Belanja Transfer	1.186.722.448.892,00	15,776
5	Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	6,944
	SURPLUS/(DEFISIT)	(588.445.729.031,00)	

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	1.025.945.729.031,00	13,639
2	Pengeluaran Pembiayaan	437.500.000.000,00	5,816
	PEMBIAYAAN NETTO	588.445.729.031,00	7,823
IV	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	

a. Kemandirian Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada APBD TA.2023 sebesar Rp6.933.947.319.883,00 terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4.731.419.182.089,00 (68,24% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Pendapatan Transfer Rp2.146.820.137.794,00 (30,96% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp55.708.000.000,00 (0,80% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah)

Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Pada APBD TA.2023 sebesar Rp.7.522.393.048.918,00 terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp4.360.987.718.569,00
- Belanja Modal Rp1.436.479.620,00
- Belanja Tak Terduga Rp15.826.456.983,00
- Belanja Bagi Hasil/ Transfer Rp1.186.722.448.892,00
- Belanja Bantuan Keuangan Rp522.374.803.508,00

Tabel 2. Posisi Kas dan Bank Pemerintah Provinsi Bali *Cut-off* 12 Juni 2023

No	Uraian Rekap	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
1	Saldo Kas Daerah	131.279.491.138,86	0,00 %
	1 Kas Tunai	131.279.491.138,86	0,00 %
	2 Kas Bank	0,00	0,00 %
2	Deposito yang dimiliki daerah	0,00	0,00 %
	1 Deposito Pemda	0,00	0,00 %

- b. Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebesar Rp2.072.564.871.779,00 atau 27,55% dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebesar Rp1.436.479.620.962,00 atau 19,09% dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali;
- d. Alokasi Belanja Per Urusan dan Alokasi Belanja untuk Urusan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Rincian Alokasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023, sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan TA.2023

Uraian Rekap	Jumlah Pagu (Rp)	% terhadap APBD 2023
1	2	3
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.829.522.570.112	24,321
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	651.275.242.521	8,658
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	850.301.071.869	11,304
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.162.363.928	0,029
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	69.807.705.391	0,928
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	33.762.307.851	0,449
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	311.272.200	0,004
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.735.600.495	0,156
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	327.405.676	0,004
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	33.335.423.482	0,443
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	604.031.276	0,008
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	50.321.793.530	0,669
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	454.490.075.027	6,042
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	32.504.678.486	0,432
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	19.656.267.904	0,261
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	25.141.076.403	0,334
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	773.958.680	0,010
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1.155.093.592	0,015
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	609.164.512.090	8,098

Uraian Rekap	Jumlah Pagu (Rp)	% terhadap APBD 2023
1	2	3
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	717.767.868	0,010
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	571.003.864	0,008
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34.377.787.168	0,457
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.306.757.984	0,031
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.969.549.208	0,039
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	28.292.168.225	0,376
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15.157.273.696	0,201
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	92.682.139.358	1,232
3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	41.901.806.712	0,557
3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.036.141.800	0,014
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	21.599.403.728	0,287
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	8.579.445.536	0,114
3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	60.159.000	0,001
4.01 Sekretariat Daerah	229.421.820.728	3,050
4.02 Sekretariat DPRD	245.214.477.367	3,260
5.01 Perencanaan	28.086.960.927	0,373
5.02 Keuangan	1.928.151.356.087	25,632
5.03 Kepegawaian	48.977.217.839	0,651
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	878.335.384	0,012
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	25.863.546.853	0,344
5.06 Penghubung	8.699.475.589	0,116
6.01 Inspektorat Daerah	43.489.332.860	0,578
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.006.670.620	0,492

Pada Tabel 3 tersebut di atas, Alokasi Belanja untuk urusan Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.829.522.570.112,00 (24,321% dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023). Sedangkan Alokasi Belanja untuk urusan Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp651.275.242.521,00 atau 8,658% (masih dibawah 10%) dari Total Belanja APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023

b. Realisasi APBD

Tabel 4 : Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023
Cut-Off 12 Juni 2023

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) (<i>Cut-off</i> 12 Juni 2023)	% CAPAIAN
Pendapatan Daerah	6.933.947.319.883,00	2.745.859.008.288,59	39,60
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	4.731.419.182.089,00	1.893.150.830.355,59	40,01
Pendapatan Transfer	2.146.820.137.794,00	852.706.551.433,00	39,72

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) (Cut-off 12 Juni 2023)	% CAPAIAN
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.708.000.000,00	1.626.500,00	0,00
BELANJA DAERAH:	7.522.393.048.914,00	2.559.796.287.081,37	34,029
Belanja Operasi	4.360.987.718.569,00	1.709.810.856.092,37	39,21
Belanja Modal	1.436.479.620.962,00	290.406.558.972,00	20,22
Belanja Tidak Terduga	15.828.456.983,00	4.258.328.161,00	26,90
Belanja Transfer	1.186.722.448.892,00	486.418.249.044,00	40,99
Belanja Bantuan Keuangan	522.374.803.508,00	68.902.294.812,00	13,19
Surplus/(Defisit)	(588.445.729.031,00)	186.062.721.207,23	31,61
PEMBIAYAAN DAERAH	588.445.729.031,00	80.133.723.425,37	13,61
Penerimaan Pembiayaan	1.025.945.729.031,00	330.133.723.425,37	32,18
Pengeluaran Pembiayaan	437.500.000.000,00	250.000.000,00	57,14
PEMBIAYAAN NETTO	588.445.729.031,00	80.133.723.425,37	13,61
SILPA	0,00	266.196.444.632,60	0,00

a. Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023 sebesar Rp2.745.859.008.288,59 atau 39,60% dari Total Anggaran Pendapatan dengan rincian :

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1.893.150.830.355,59 atau 40,01% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah).
- Realisasi Transfer Rp852.706.551.433,00 atau 39,72% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah).
- Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Rp1.626.500,00 atau 0,002% dari Total Anggaran Pendapatan Daerah).

b. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023 sebesar Rp2.559.796.287.081,37 atau 34,029% dari Total Anggaran Belanja, dengan rincian per Jenis Belanja sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Operasi Rp1.709.810.856.092,37 atau 39,21% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Modal Rp290.406.558.972,00 atau 20,22% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Tak Terduga Rp4.258.328.161,00 atau 29,90% dari Total Anggaran Belanja Daerah).

- Realisasi Belanja Transfer Rp486.418.249.044,00 atau 40,99% dari Total Anggaran Belanja Daerah).
- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Rp66.902.294.812,00,00 atau 13,19% dari Total Anggaran Belanja Daerah).

c. Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan

Sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, Realisasi Belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023 sebesar Rp2.559.796.287,08 atau 34,029% dari Total Anggaran Belanja, dengan Realisasi Tertinggi Belanja Urusan Bidang Pemerintahan Pelayanan Dasar Wajib adalah Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (47,82%), namun masih terdapat 12(dua belas) Urusan Bidang Pemerintahan Pelayanan Dasar dengan Realisasi <30% yaitu Urusan Pemerintahan Bidang : Perhubungan (29,45%), Pendidikan (29,06%, Statistik (28,84%), Kearsipan (27,39%), Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah(27,32%), Perpustakaan (24,65%), Persandian (26,84%), Pendidikan dan Pelatihan (14,76%, Lingkungan Hidup (13,07%), Komunikasi dan Informatika (11,07%), Energi dan Sumber Daya Mineral (3,26%), Pertanahan (0,18%).

Sedangkan Realisasi Belanja Tertinggi Urusan Penunjang adalah Bidang Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 72,79% dan Realisasi Terendah Urusan Penunjang adalah Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar 14,76%. Adapun rincian Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 5: Realisasi Belanja Per Urusan Bidang Pemerintahan
Cut-off 12 Juni 2023

	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
	1	2	3	4
1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.829.522.570.112,00	531.747.842.080,00	29,06 %
2	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	651.275.242.521,00	205.639.002.948,37	31,57 %
3	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	850.301.071.869,00	406.615.477.943,00	47,82 %
4	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	2.162.363.928,00	477.552.688,00	22,08 %

Uraian		Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
1		2	3	4
5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	69.807.705.391,00	27.682.299.814,00	39,66 %
6	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	33.762.307.851,00	10.798.850.648,00	31,98 %
7	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	311.272.200,00	570.000,00	0,18 %
8	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.735.600.495,00	1.533.304.725,00	13,07 %
9	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	327.405.676,00	155.074.204,00	47,36 %
10	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	33.335.423.482,00	14.542.343.284,00	43,62 %
11	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	604.031.276,00	253.768.948,00	42,01 %
12	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	50.321.793.530,00	14.818.285.704,00	29,45 %
13	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	454.490.075.027,00	50.291.752.365,00	11,07 %
14	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	32.504.678.486,00	8.881.859.175,00	27,32 %
15	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	19.656.267.904,00	8.118.900.989,00	41,30 %
16	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	25.141.076.403,00	9.116.961.804,00	36,26 %
17	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	773.958.680,00	223.197.134,00	28,84 %
18	2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1.155.093.592,00	301.921.132,00	26,14 %
19	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	609.164.512.090,00	281.055.223.315,00	46,14 %
20	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	717.767.868,00	176.903.130,00	24,65 %
21	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	571.003.864,00	156.391.300,00	27,39 %
22	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	34.377.787.168,00	14.485.735.379,00	42,14 %
23	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.306.757.984,00	727.658.658,00	31,54 %
24	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.969.549.208,00	1.121.364.448,00	37,76 %
25	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	28.292.168.225,00	10.534.788.905,00	37,24 %

Uraian		Jumlah Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persen
1		2	3	4
26	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15.157.273.696,00	6.619.747.467,00	43,67 %
27	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	92.682.139.358,00	29.830.059.771,00	32,19 %
28	3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	41.901.806.712,00	17.363.219.478,00	41,44 %
29	3.29 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	1.036.141.800,00	33.822.152,00	3,26 %
30	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	21.599.403.728,00	9.378.514.351,00	43,42 %
31	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	8.579.445.536,00	2.710.309.327,00	31,59 %
32	3.32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	60.159.000,00	28.764.430,00	47,81 %
33	4.01 Sekretariat Daerah	229.421.820.728,00	82.135.666.904,00	35,80 %
34	4.02 Sekretariat DPRD	245.214.477.367,00	78.590.367.193,00	32,05 %
35	5.01 Perencanaan	28.086.960.927,00	8.779.706.596,00	31,26 %
36	5.02 Keuangan	1.928.151.356.087,00	649.481.451.854,00	33,68 %
37	5.03 Kepegawaian	48.977.217.839,00	16.967.078.113,00	34,64 %
38	5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	878.335.384,00	129.658.463,00	14,76 %
39	5.05 Penelitian Dan Pengembangan	25.863.546.853,00	9.255.307.049,00	35,79 %
40	5.06 Penghubung	8.699.475.589,00	3.543.837.146,00	40,74 %
42	6.01 Inspektorat Daerah	43.489.332.860,00	18.556.204.513,00	42,67 %
43	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.006.670.620,00	26.935.541.554,00	72,79 %
Jumlah		7.522.393.048.914,00	2.559.796.287.081,37	34,029%

c. Pengadaan Barang/Jasa

a. Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali TA 2023

Rencana Pengadaan Barang/Jasa pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023 sebanyak 9.507 Paket dengan nilai Rp2,860,207,596,120,00 terdiri dari Metode Pengadaan Swakelola sebanyak 3.464 Paket dengan nilai Rp.967.117.727.211,00 dan Metode Pengadaan melalui Penyedia sebanyak 6.043 Paket dengan nilai Rp1.893.089.868.909,00 sesuai rincian pada Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6: Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali TA.2023

Cut-off 12 Juni 2023

No	METODE PENGADAAN	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL PBJ TAHUN 2023	
		Pkt	Jumlah (Rp)	Pkt	Jumlah (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SWAKELOLA	17	1.819.414.936	70	4.349.354.000	78	6.770.878.000	3.299	954.178.80.275	3.464	967.117.727.211

Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023

No	METODE PENGADAAN	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL PBJ TAHUN 2023	
		Pkt	Jumlah (Rp)	Pkt	Jumlah (Rp)	Pkt	Jumlah (Rp)	Pkt	Jumlah (Rp)	Pkt	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PENYEDIA	5.302	1.611.383.176.310	579	270.925.652.341	129	9.805.953.458	33	975.086.800	6.043	1.893.089.868.909
1	E-Purchasing	3.140	364.823.680.973	341	33.902.770.338	70	3.065.015.400	24	509.407.800	3.575	402.300.874.511
2	E-Tender/Seleksi/Tender Cepat	113	651.940.715.306	49	221.672.543.772	6	4.177.833.858	-	-	168	877.791.092.936
3	Kontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sayembara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Langsung	1.042	169.526.619.257	152	13.406.658.961	41	2.306.179.800	5	146.859.000	1.240	185.386.317.018
6	Penunjukan Langsung	61	32.735.305.761	4	60.759.000	4	17.912.400	1	238.620.000	70	33.052.597.161
7	Dikecualikan	946	392.356.855.013	33	1.882.920.270	8	239.012.000	3	80.200.000	990	394.558.987.283
	TOTAL I+II	5.319	1.613.202.591.246	649	275.275.006.341	207	16.576.831.458	3.332	955.153.167.075	9.507	2.860.207.596.120

b. Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali

Progres Realisasi Pengadaan Barang/Jasa pada APBD Pemerintah Provinsi Bali TA.2023 sebanyak 9.507 Paket dengan nilai Rp2.860.207.596.120,00 terdiri dari:

- Jumlah PBJ Sudah Berkontrak 6.528 Paket dengan nilai Rp386.132.899.200,35
- Jumlah PBJ Dalam Proses 1.033 Paket dengan nilai Rp322.710.863.417,60
- Jumlah PBJ Sudah Selesai Fisik 100% 4.487 Paket dengan nilai Rp66.549.608.861,78 dengan rincian sesuai Metode Pengadaan pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7: Realisasi Pengadaan Barang/Jasa *Cut-off* 12 Juni 2023

No	Metode Pengadaan	Target PBJ Tahun 2023		Jumlah PBJ Sudah Berkontrak		Jumlah PBJ Dalam Proses		Jumlah PBJ Selesai 100%	
		Paket	Nilai PBJ (Rp)	Paket	Nilai PBJ (Rp)	Paket	Nilai PBJ (Rp)	Paket	Nilai PBJ (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SWAKELOLA	3.464	967.117.727.211						
II	PENYEDIA								
1	E-Purchasing	3.481	398.726.451.311	6252	110.866.647.246,35	757	47.444.611.463,60	4.487	66.549.608.861,78
2	E-Tender/ Seleksi/Tender Cepat	162	873.613.259.078	45	166.175.819.890,00	45	166.175.819.890,00		
3	Kontes	-	-						
4	Sayembara	-	-						
5	Pengadaan Langsung	1.194	182.933.278.218	187	54.745.663.409,00	187	54.745.663.409,00		
6	Penunjukan Langsung	65	32.796.064.761	14	52.850.137.055,00	14	52.850.137.055,00		
7	Dikecualikan	979	394.239.775.283	30	1.494.631.600,00	30	1.494.631.600,00		
	TOTAL	9.507	2.860.207.596.120	6.528	386.132.899.200,35	1.033	322.710.863.417,60	4.487	66.549.608.861,78

d. Spending Reviu Belanja APBD pada Sektor Pekerjaan Umum**a. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2020 s.d 2023**

kode_subkegiatan	uraian_subkegiatan	anggaran_2020	anggaran_2021	anggaran_2022	anggaran_2023	realisasi_2020	realisasi_2021	realisasi_2022	realisasi_2023
1.3.3.101.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2,547,399,290	1,261,482,860	1,249,246,336	2,275,540,964	2,356,820,710	974,912,055	1,235,903,520	447,830,331
1.3.3.101.002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	-	-	-	535,432,900	-	-	-	-
1.3.3.101.003	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	-	34,738,387,959	4,127,631,550	9,264,682,600	-	25,411,869,760	4,087,631,550	10,750,892
1.3.3.101.004	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.005	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	10,993,981,800	2,799,705,000	-	1,141,218,100	-	-	-	266,774,220
1.3.3.101.006	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.007	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.008	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.009	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.010	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.101.011	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

kode_subkegiatan	uraian_subkegiatan	anggaran_2020	anggaran_2021	anggaran_2022	anggaran_2023	realisasi_2020	realisasi_2021	realisasi_2022	realisasi_2023
1.3.3.101.012	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4,884,429,810	1,179,388,053	2,413,262,456	3,567,559,200	4,186,585,100	1,163,192,536	2,018,132,351	26,085,000
1.3.10.101.002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	-	75,834,215,641	133,624,047,600	-	-	26,319,304,145	133,242,956,996	-
1.3.10.101.003	Pengelolaan Leger Jalan	-	196,320,618	119,974,898	-	-	195,416,558	118,962,825	-
1.3.10.101.004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	846,445,698	544,974,898	1,728,414,000	-	659,406,968	443,776,575	13,078,818
1.3.10.101.005	Pembangunan Jalan	-	108,058,088,233	408,321,279,558	77,129,954,049	-	27,255,113,850	320,531,992,644	71,287,417,299
1.3.10.101.006	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	40,798,873,991	-	85,861,058,704	-	26,124,401,959	-	139,787,688
1.3.10.101.007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.008	Rekonstruksi Jalan	-	-	9,332,501,900	-	-	-	6,512,051,000	-
1.3.10.101.009	Rehabilitasi Jalan	23,140,922,556	-	-	-	20641858147#	-	-	-
1.3.10.101.010	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	18,119,122,410	68,989,153,391	-	-	13,615,614,000	-
1.3.10.101.011	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	16,283,692,498	14,286,419,101.00	19,328,657,487	-	15,748,101,935	13,790,126,972	2,991,374,984
1.3.10.101.012	Pembangunan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.013	Pembangunan Flyover	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.014	Pembangunan Underpass	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.015	Pembangunan Terowongan/Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.016	Penggantian Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.017	Pelebaran Jembatan	-	2,485,879,573	1,619,879,600	-	-	-	-	-
1.3.10.101.018	Rehabilitasi Jembatan	-	1,494,479,800	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.020	Pemeliharaan Berkala Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	-	10,532,377,245	10,010,724,195	3,642,452,183	-	10,447,789,645	8,369,767,250	603,560,000

kode_subkegiatan	uraian_subkegiatan	anggaran_2020	anggaran_2021	anggaran_2022	anggaran_2023	realisasi_2020	realisasi_2021	realisasi_2022	realisasi_2023
1.3.10.101.018	Rehabilitasi Jembatan	-	1,494,479,800	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.020	Pemeliharaan Berkala Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	-	10,532,377,245	10,010,724,195	3,642,452,183	-	10,447,789,645	8,369,767,250	603,560,000
1.3.10.101.022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10.101.023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	2,186,003,776	1,467,472,587	4,314,300,108	-	1,845,566,547	1,290,624,130	65,943,160

b. Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Mantap (km)	614.39	586.53	587.35	594.28
2	Panjang Jalan Kondisi Tidak Mantap (km)	128.95	156.81	155.99	149.06
3	Jumlah Jembatan Mantap (unit)	118	123	128	127
4	Jumlah Jembatan Tidak Mantap (unit)	6	5	0	2
5	Titik Konektivitas Darat Yang Sudah Terhubung (titik)	Sudah terhubung semua	Sudah terhubung semua	Sudah terhubung semua	Sudah terhubung semua
6	Titik Konektivitas Darat Yang Belum Terhubung (titik)	0	0	0	0

e. Spending Reviu Belanja APBD atas Capaian Kinerja Tahun 2019 s.d 2022 pada Sektor Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1	Capaian UHC	95.95	91.78	93.3	98.01	
2	Angka Harapan Hidup	71.99	72.13	72.24	72.6	
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran	67.6	83.8	189.79	110.4	
4	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	5	5.1	5.8	8.2	
5	Prevalensi Stunting (%)	14.4		10.9	8	thn 2020, tdk ada pengukuran Balita karena dalam situasi Pandemi Covid-19
6	Prevalensi Wasting (%)				2.8	Survey Wasting dilakukan dalam skala nasional pada tahun 2022
7	Prevalensi TBC (%)					Prevalensi merupakan hasil Survey, utk Prevalensi TB terakhir dilakukan skala nasional tahun 2013. khusus Bali tidak pernah dilakukan survey TB.
8	Prevalensi HIV (%)					Prevalensi merupakan hasil Survey, utk Prevalensi HIV dilakukan skala nasional tahun 2013. Tingkat Provinsi tidak pernah dilakukan survey HIV.
9	Prevalensi Hipertensi (%)	40.5	22.1	48.8	56.1	
10	Jumlah Puskesmas Terakreditasi (buah)	120	120	120	120	
11	Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi (buah)	0	0	0	0	
12	Jumlah RSUD yang Sudah Terakreditasi (buah)	10	10	10	10	
13	Jumlah RSUD yang Belum Terakreditasi (buah)	0	0	0	0	
14	RSUD Berstatus BLUD (buah)	10	10	10	10	
15	RSUD Non BLUD (buah)	0	0	0	0	
16	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	57.1	43.7	43.3	44.2	
17	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Tersedia (orang)	26,638	28,975	30,690	32,585	
18	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Seharusnya (orang)					Provinsi Bali hanya tersedia data Rasio. Sementara untuk kebutuhan SDMK hanya terhitung berdasarkan perhitungan ANJAB ABK Puskesmas dan RS milik Pemerintah Daerah

f. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri (RUP PDN) terhadap Total RUP dengan cut-off 12 Juni 2023 sebanyak 9.507 Paket senilai Rp2.860.207.596.120,00 dengan Alokasi Belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp1.828.825.892.190,00 atau 96,89%.

Realisasi Produk Dalam Negeri (RUP PDN) sebesar Rp387.015.799.113,42 atau 83,59% dari Alokasi RUP PDN.

g. PBJ untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi

Alokasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi Tahun.2023 dengan cut-off 12 Juni 2023 sebanyak 9.507 Paket senilai Rp2,860,207,596,120,00 dengan Belanja UMKM sebesar 1.073.892.294.475,00 atau 56,89%.

Sedangkan Realisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi terhadap Total RUP PDN sebesar Rp276.856.771.180,56 atau 83,59% dari Alokasi RUP PDN.

E. Korsupgah**1. Capaian Pemerintah Provinsi Bali**

Adapun perkembangan capaian nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 telah mengalami tren peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen dari Pimpinan dan semua Perangkat Daerah Pelaksana Area Intervensi dalam menindaklanjuti seluruh indikator dan sub indikator yang diwajibkan dalam Korsupgah KPK. Adapun peningkatan capaian nilai MCP sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Capain Pemerintah Provinsi Bali hasil Verifikasi KPK	92%	98,57%	98,86%	99,20%

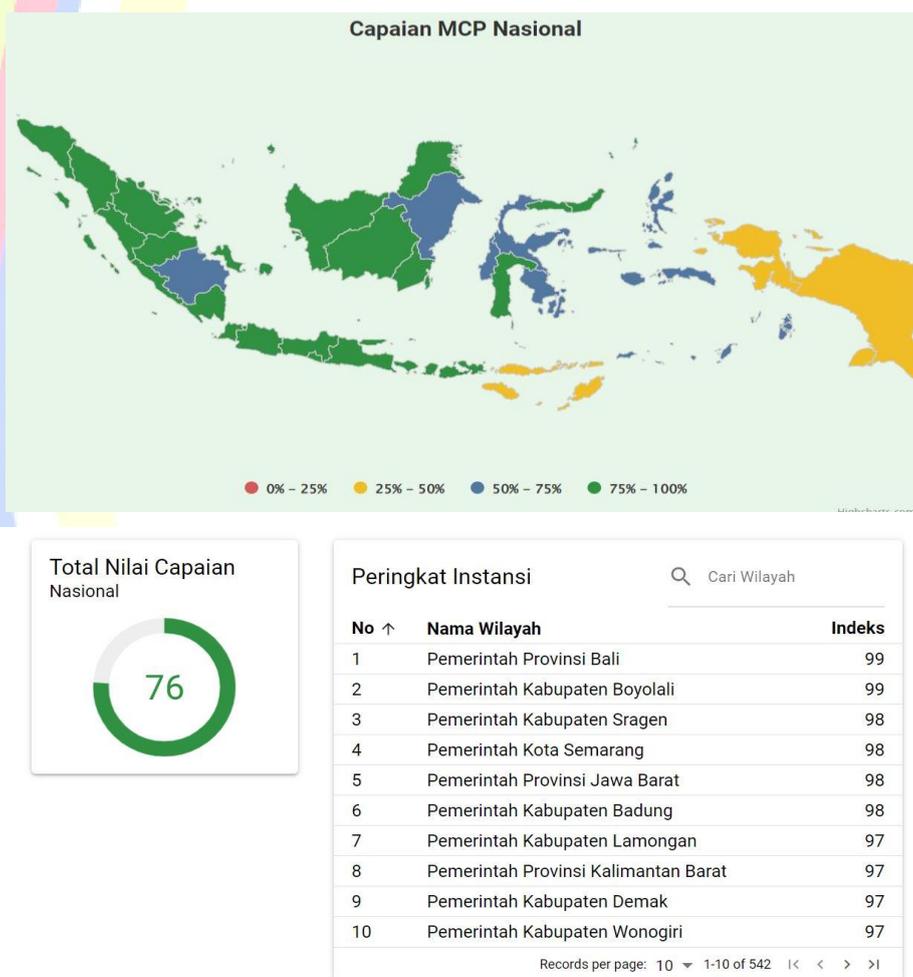
Catatan : Data diolah dari Laporan

2. Peringkat Pada Triwulan IV Tahun 2022

a. Pelaksanaan kegiatan Korsupgah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan nilai capaian yang sangat luar biasa, hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh Indikator dan sub indikator yang dipersyaratkan pada aplikasi MCP dapat dipenuhi/dicapai dengan nilai 100%.

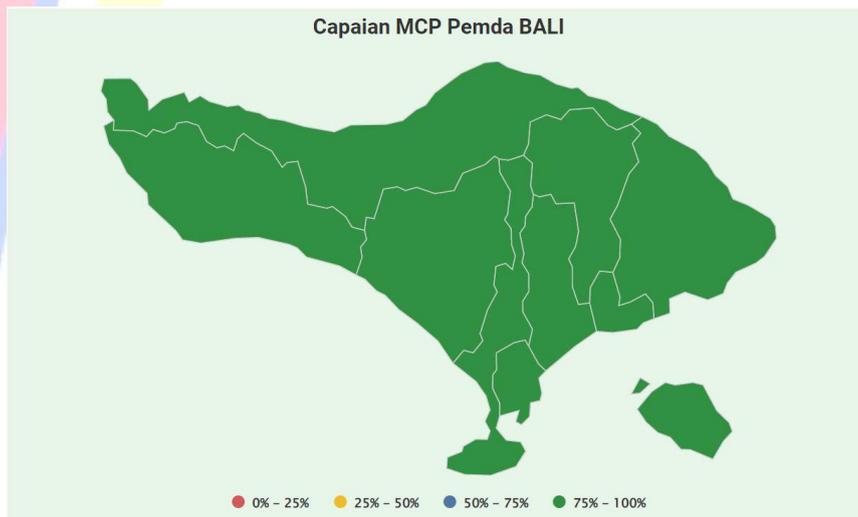
- b. Untuk pelaksanaan Korusupgah secara Nasional, nilai rata-rata capaian **sebesar 76%**.
- c. Untuk **nilai rata-rata capaian Provinsi Bali** (gabungan nilai capaian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali) sebesar **95,59%** dan menduduki **Peringkat I dari 34 Provinsi se-Indonesia**.
- d. Khusus nilai capaian **Pemerintah Provinsi Bali** sebesar **99,20%** dan menduduki :
 - a. **Peringkat I dari 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia**
 - b. **Peringkat I dari 543 Pemerintah Daerah se-Indonesia**
 - c. **Peringkat I dari 10 Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) se-Bali**

Gambar 1.1
Nilai Rata-rata Capaian Korusupgah Nasional





Gambar 1.2
Nilai Capaian Korsupgah Provinsi Bali



Total Nilai Capaian Pemerintah Provinsi Bali

99

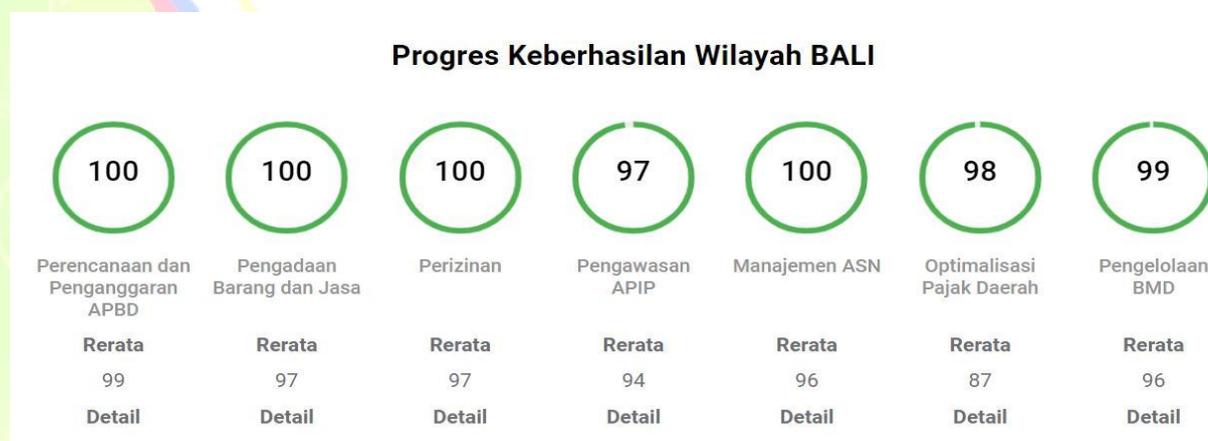
Nilai Rerata Provinsi Bali

96

Peringkat Instansi Cari Wilayah

No ↑	Nama Wilayah	Indeks
1	Pemerintah Provinsi Bali	99
6	Pemerintah Kabupaten Badung	98
20	Pemerintah Kota Denpasar	96
22	Pemerintah Kabupaten Bangli	96
24	Pemerintah Kabupaten Buleleng	96
25	Pemerintah Kabupaten Gianyar	96
37	Pemerintah Kabupaten Tabanan	95
51	Pemerintah Kabupaten Klungkung	95
90	Pemerintah Kabupaten Karangasem	93
104	Pemerintah Kabupaten Jembrana	93

Records per page: 10 ▾ 1-10 of 10



e. Posisi peringkat 10 besar secara Nasional terhadap 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia sebagai berikut :

Peringkat 10 Besar	Peringkat Nasional	Pemerintah Provinsi	Capaian (%)
1	1	Pemerintah Provinsi Bali	99,20
2	5	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	98,23
3	8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	96,74
4	21	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	95,90
5	23	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	95,77
6	27	Pemerintah Provinsi Banten	95,54
7	50	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	94,81
8	59	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	94,50
9	61	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94,44
10	74	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	93,92

f. Posisi peringkat 10 besar secara Nasional terhadap 542 Pemerintah Daerah se-Indonesia sebagai berikut :

Peringkat 10 Besar	Pemerintah Daerah	Capaian (%)
1	Pemerintah Provinsi Bali	99,20
2	Pemerintah Kabupaten Boyolali	98,87
3	Pemerintah Kabupaten Sragen	98,37
4	Pemerintah Kota Semarang	98,37
5	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	98,23
6	Pemerintah Kabupaten Badung	97,87
7	Pemerintah Kabupaten Lamongan	96,81
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	96,74
9	Pemerintah Kabupaten Demak	96,62
10	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	96,52

g. Nilai capaian secara Nasional terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) se-Bali sebagai berikut :

Peringkat 10 Besar	Peringkat Nasional	Pemerintah Daerah Se-Bali	Capaian (%)
1	1	Pemerintah Provinsi Bali	99,20
2	6	Pemerintah Kabupaten Badung	97,87
3	20	Pemerintah Kota Denpasar	95,93
4	22	Pemerintah Kabupaten Bangli	95,77
5	24	Pemerintah Kabupaten Buleleng	96,76
6	25	Pemerintah Kabupaten Gianyar	95,73
7	37	Pemerintah Kabupaten Tabanan	95,15
8	51	Pemerintah Kabupaten Klungkung	94,81
9	90	Pemerintah Kabupaten Karangasem	93,03
10	104	Pemerintah Kabupaten Jembrana	92,60

F. Laporan Hasil Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022

Berdasarkan Hasil Pengawasan, sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, diketahui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali telah mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. Hal ini tercermin dari telah dilaksanakan Sub Kegiatan yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran antara lain:

- 1) Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang dengan Anggaran sebesar Rp77.500.000;

Sesuai dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang dengan target 70 orang dengan Output tersedianya kebutuhan pangan anak berupa Pakaian Seragam Sekolah, Sepatu Sekolah dll.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 pada Pilar 4; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

- 2) Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan Anggaran sebesar Rp15.800.000;

Sesuai dengan Indikator Sub Kegiatan yaitu: Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan target 70 orang dengan Output tersedianya obat-obatan termasuk pemberian Vitamin secara rutin kepada Anak dalam Panti.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 pada Pilar 4; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan

masyarakat, huruf a.3) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).

3) Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial, P3A Provinsi Bali telah mengalokasikan Kegiatan yang secara spesifik mendukung Program

Percepatan Penurunan Stunting yaitu Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Melalui Sosialisasi Stunting dengan Organisasi Masyarakat dan Pemerintah

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 pada Pilar 3; Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa; pada angka 1). Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);

Berdasarkan hasil pencermatan atas Dokumen dan hasil Cek Fisik pada Sub Kegiatan, diketahui secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk lebih disempurnakan antara lain:

1. Terdapat Penatausahaan Barang tidak sesuai ketentuan
2. Terdapat Pertanggungjawaban Pengisian Tabung Gas tidak sesuai ketentuan
3. Terdapat Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa yang harus terima oleh Anak Terlantar Tidak berdasarkan hasil Asesmen dari Pekerja Sosial dan Profesional

4. Terdapat Pelaksanaan Pengadaan Pemakanan Tidak sesuai ketentuan

5. Terdapat Capaian Kegiatan tidak sesuai dengan target kinerja

G. Rencana Kerja Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Inspektorat

Daerah Provinsi Bali

No	Indikator	Uraian Kegiatan	Waktu	PIC	Keterangan
1	Komponen Implementasi	Diseminasi Gratifikasi : Diseminasi Internal	TW I, II ,III, dan IV	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Sudah dilakukan melalui website yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali. Disebarkan juga banner, stiker dan poster ke seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
		Diseminasi Eksternal	TW I, II ,III, dan IV	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Akan dilakukan Bimbingan Teknis e-learning TW II/III karena masih menunggu konfirmasi tentang jadwal dari KPK.
		Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi dan Mitigasi Risiko	TW I, II ,III, dan IV	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Melakukan pemetaan titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi di wilayah kerja masing-masing dan melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan di wilayah kerja masing-masing
		Inovasi	TW I, II ,III, dan IV	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Dalam Proses menentukan inovasi terhadap Perangkat Daerah atau stakeholders sebagai pelapor gratifikasi yang rajin melaporkan dan pembuatan aplikasi tindak lanjut dari pelaporan gratifikasi yang telah ditangani.
2	Komponen Laporan	Penanganan Laporan Gratifikasi	TW I, II ,III, dan IV	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Akan dilakukan pelaporan setiap semester dan akan mengkompulir data pelaporan gratifikasi dari semua Perangkat Daerah dan stakeholders dan akan dilaporkan secara online melalui aplikasi GOL KPK.

H. Laporan Survei Penilaian Integritas

Sosialisasi Antikorupsi/Pengendalian Gratifikasi terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 ke Perangkat Daerah dan UPTD. Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali, bersama ini dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Penyerahan Spanduk Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 ke UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan, UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung, UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar dan UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung.
2. Penyerahan Spanduk Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 ke Perangkat Daerah antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Perdagangan Provinsi Bali.
3. Penyerahan Banner Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 ke UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar
4. Penyerahan Banner Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 ke seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
5. Sosialisasi langsung kepada pengguna layanan Wajib Pajak di semua PPRD. Provinsi Bali di Kabupaten/Kota untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan Scan Kode QR Survei Penilaian Integritas dan menginformasikan bahwa mereka telah terdaftar sebagai responden dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan akan menerima WhatsApp Blast Resmi ataupun Email Blast untuk tidak diabaikan dan dijawab sesuai dengan pengetahuan mereka
6. Dalam kesempatan ini disampaikan juga mulai bulan Juli s.d Agustus 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 melalui WA Blast diharapkan apabila Pegawai ASN dan Non ASN menerima WA Blast tidak mengabaikan dan menyelesaikan survei dengan selesai.

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bali.

Perkembangan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK RI pada Triwulan IV Tahun 2023 yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, dapat kami laporkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil perkembangan pemantauan tindak lanjut pada triwulan IV tahun 2023 atas pemeriksaan tahun 2023 untuk LKPD 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pengendalian Pencegahan Korupsi melalui Aksi/Subaksi Tahun 2022 dan LKPD Tahun 2021, telah mencapai penyelesaian **99,93%** dinyatakan sesuai dan selesai, namun masih terdapat 1 (satu) rekomendasi memerlukan pemenuhan dokumen tindak lanjut untuk dapat dinyatakan sesuai, yaitu:

“Laporan Hasil Pemerintah LKPD Tahun 2021 yang terdapat 12 (dua belas) temuan dan 42 (empat puluh dua) rekomendasi saat ini masih terdapat 1 (satu) rekomendasi untuk pemenuhan tindak lanjut adalah Menyelesaikan proses pendataan dan pemetaan tanah eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran, memproses sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai pemerintah, yang perlu dilengkapi bukti **proses penerbitan sertifikasi bidang tanah yang akan dimiliki dan dikuasai Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana temuan pemeriksaan**”.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Laporan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada **Triwulan IV tahun 2023** terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus pada Perangkat Daerah Provinsi Bali, Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri di Kabupaten Gianyar, Buleleng, Karangasem, Tabanan, Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dan Laporan Hasil Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali dengan hasil sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Reguler pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Biro PBJ dan Perekonomian Setda Provinsi Bali T.09.700/81/Itprov 6 Januari 2023	11	13	13			100 %
2	Badan Penghubung Provinsi Bali R.09.700/82/IR.II /Itprov 6 Januari 2023	8	9	9			100 %
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali T.09.700/83/Itprov 6 Januari 2023	24	27	27			100 %
4	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali T.09.700/84/IR.IV /Itprov 6 Januari 2023	8	10	10			100 %
	Jumlah	51	59	59			100 %

b. Pemeriksaan Khusus pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Dinas PUPR Dan Perkim Provinsi Bali T.09.700/85/Itprov 6 Januari 2023	17	19	14	5	9.359.222,-	73,68 % Kerugian telah disetor ke Kasda
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali T.09.700/86/Itprov 6 Januari 2023	13	14	14		416.719,-	100 % Kerugian telah disetor ke Kasda
3	Biro Umum Dan Protokol Setda Provinsi Bali T.09.700/87/IR.IV I/Itprov 6 Januari 2023	8	8	8			100 %
	Jumlah	38	41	36	5	9.775.941,-	87,80%

c. Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri, S1LB di Kabupaten Gianyar

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMKN 1 Mas Ubud B.09.700/1501/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	6	6	6			100 %
2	SMAN 1 Blahbatuh B.09.700/1502/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	8	8	8			100 %
3	SMKN 1 Gianyar B.09.700/1503/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	6	6	6			100 %
4	SMAN 1 Ubud B.09.700/1504/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	4	4	4			100 %
5	SLBN 1 Gianyar B.09.700/1505/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	9	9	9			100 %
6	SMAN 1 Tegallalang B.09.700/1506/IR .IV/Itprov 30 Januari 2023	4	4	4			100 %
	Jumlah	37	37	37			100 %

d. Monev Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri, SLB di Kabupaten Buleleng

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 3 Singaraja B.09.700/5343/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	6	6	6			100 %
2	SMKN 3 Singaraja B.09.700/5348/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	5	5	5			100 %
3	SMKN 1 Seririt B.09.700/5344/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	6	6	6			100 %
4	SMAN 4 Singaraja B.09.700/5345/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	6	6	6			100 %
5	SLBN 2 Buleleng B.09.700/5346/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	5	5	5			100 %
6	SMAN 2 Banjar B.09.700/5347/IR .IV/Itprov 16 Maret 2023	5	5	5			100 %
	Jumlah	33	33	33			100 %

e. Money Dana BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri, SLB di Kabupaten Karangasem

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMAN 1 Manggis B.09.700/6623/IR .IV/Itprov 3 April 2023	7	7	7			100 %
2	SMKN 1 Manggis B.09.700/6624/IR .IV/Itprov 3 April 2023	6	6	6			100 %
3	SMAN 1 Sidemen B.09.700/6625/IR .IV/Itprov 3 April 2023	5	5	5			100 %
4	SMKN1 Bebandem B.09.700/6626/IR .IV/Itprov 3 April 2023	7	7	7			100 %
5	SLBN 1 Karangasem B.09.700/6627/IR .IV/Itprov 3 April 2023	5	5	4			100 %
6	SMKN 1 Amlapura B.09.700/6628/IR .IV/Itprov 3 April 2023	8	8	8			100 %
	Jumlah	38	38	38			100 %

f. Monev Dana BOS pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Tabanan

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	SMKN 3 Tabanan B.09.700/8174/IR .IV/Itprov 26 April 2023	5	5	5			100 %
2	SMKN 2 Tabanan B.09.700/8175/IR .IV/Itprov 26 April 2023	7	7	7			100 %
3	SMAN 1 Kediri B.09.700/8176/IR .IV/Itprov 26 April 2023	7	7	7			100 %
	Jumlah	19	19	19			100 %

g. Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Pemerintah Kabupaten Tabanan T.09.700/7978/IR .I/Itprov 10 Oktober 2022	21	32	32			100 %
2	Pemerintah Kota Denpasar T.09.700/7979/IR .II/Itprov 10 Oktober 2022	19	21	21			100 %
3	Pemerintah Kabupaten Gianyar T.09.700/7980/IR .III/Itprov 10 Oktober 2022	19	20	20			100 %
4	Pemerintah Kabupaten Bangli T.09.700/7981/IR .IV/Itprov 10 Oktober 2022	19	21	21			100 %
5	Pemerintah Kabupaten Buleleng T.09.700/8602/IR .I/Itprov 7 Nopember 2022	14	22	22			100 %

6	Pemerintah Kabupaten Badung T.09.700/8734/IR.II/Itprov 7 Nopember 2022	16	18	18			100 %
7	Pemerintah Kabupaten Karangasem T.09.700/8604/IR.III/Itprov 7 Nopember 2022	30	31	31			100 %
8	Pemerintah Kabupaten Jembrana T.09.700/8605/IR.IV/Itprov 7 Nopember 2022	15	16	16			100 %
9	Pemerintah Kabupaten Klungkung T.09.700/9421/IR.II/Itprov 7 Desember 2022	19	22	22			100 %
	Jumlah	172	203	203			100 %

h. Laporan Hasil Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Provinsi Bali

	Obrik No. / Tgl. LHP	Temuan	Rekom	Selesai	Dalam Proses	Kerugian Daerah	Ket.
1	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali T.09.700/15864/IR. I/Itprov 5 September 2023	1	1	1			100 %
2	UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali T.09.700/15876/IR. II/Itprov 5 September 2023	8	8	4	4		50,00 %
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali T.09.700/15881/IR. III/Itprov 5 September 2023	14	14	10	4		71,43 %
4	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali T.09.700/15863/IR. IV/Itprov 5 September 2023	3	3	3			100 %
	Jumlah	26	26	18	8		69,23 %

3. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

- a. Adapun fokus Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdiri dari :
1. Pendapatan Daerah
 2. Belanja Daerah
 3. Barang Milik Daerah (BMD/Aset Daerah)
 4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 5. Pelayanan Publik Daerah
- b. Adapun progress/perkembangan tindak lanjut yang telah dilaksanakan sampai dengan hari ini yang dapat kami laporkan yaitu dari data hasil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdapat 24 rekomendasi yang statusnya sudah sesuai/selesai dengan **persentase 82,7%** serta terdapat 5 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah antara lain :
1. BPKAD belum bisa menyampaikan dokumen PSP tanah yang menjadi milik Pemda setelah dilakukan hibah kepada masyarakat terhadap aset Pemprov yang menjadi objek pengawasan.
 2. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian belum menyampaikan tindak lanjut hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap target dan capaian realisasi kinerja Perumda Kerta Bali Saguna.
 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian belum menyampaikan tindak lanjut hasil analisis/kajian investasi yang dilakukan terhadap penyertaan modal Pemprov Bali untuk PT Jasamarga Bali Tol pada Tahun 2013 senilai RP.100.000.000, karena sampai dengan saat ini tidak terdapat dividen yang diberikan oleh PT Jasamarga Bali Tol.
 4. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian belum menyampaikan tindak lanjut progress penambahan modal kepada PT. BPD Bali karena berdasarkan dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, jumlah penyertaan modalnya masih sama yaitu senilai Rp. 719.912.000,00/belum terdapat penambahan modal berdasarkan hasil analisis investasi, sementara Pemprov direkomendasikan untuk menambah penyertaan modal sebesar

- Rp. 1.000.000.000, namun belum ada bukti terlampir bahwa sudah dilaksanakan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 tersebut.
5. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian belum menyampaikan tindak lanjut berupa hasil penelaahan terhadap rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD serta Hasil Monitoring dan Evaluasi BUMD
- c. Hasil koordinasi dengan staff BPKAD Provinsi Bali terkait dokumen PSP yang diminta sebagai tindak lanjut BKPAD Provinsi Bali menjelaskan bahwa Provinsi Bali belum dapat menerbitkan dokumen PSP terhadap aset yang dimaksud dan sedang membahas penyelesaian terhadap temuan tersebut. Sedangkan hasil koordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan perekonomian Setda Provinsi Bali sampai dengan saat ini tidak ada perkembangan/progresss yang disampaikan untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut.

BAB IV

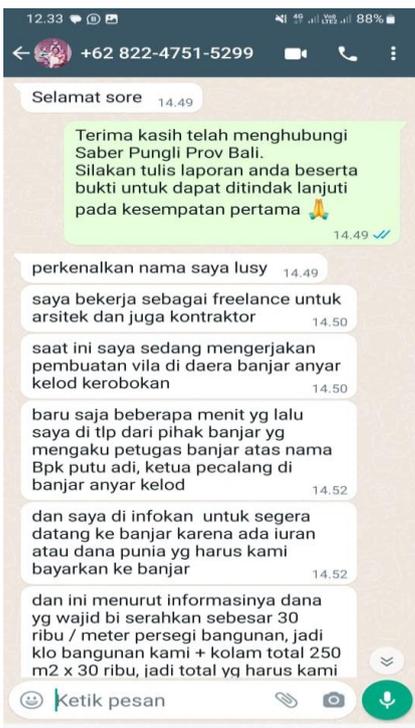
HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh masyarakat.

1. Saber Pungli

Sampai dengan Semester II Tahun 2023, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali berjumlah :

1. Mendatangi Posko	=	0
2. Surat	=	0
3. SMS	=	0
4. Email	=	0
5. WA	=	1
6. Telephone	=	0

No.	Tanggal	Uraian	Lokasi	Keterangan	Dokumentasi
1.	Juni 2023	Pengaduan di Banjar Anyar Kelod Desa Adat Kerobokan, terkait indikasi pungli berupa pungutan yang dilakukan oleh Banjar Adat berupa dana yg wajib diserahkan untuk perbangunan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Banjar tersebut.	Denpasar	Sudah dilakukan klarifikasi dengan kelian banjar dan penyarikan desa adat kerobokan	

Dari pertanyaan yang masuk melalui WA telah di tindaklanjuti dengan :

1. Melakukan klarifikasi dengan pejabat desa (Kelian Banjar dan penyarikan Desa) dengan kesimpulan:
 - a. Memang benar adanya Dudukan apabila membangun di wilayah Banjar Adat Anyar Kelod dipungut sumbangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/M² yang dipungut oleh Pecalang Banjar Adat.
 - b. Dudukan yang terjadi di Banjar Anyar Kelod, Desa Adat Kerobokan berdasarkan Pararem Banjar bukan Pararem Desa Adat Kerobokan, hal ini tidak dapat dibenarkan karena yang sebagai Subyek Hukum adalah Desa Adat.
 - c. Desa Adat Kerobokan telah menyusun Draf Pararem tentang Krama Desa, Krama Tamiu dan Tamiu yang ada di Desa Adat Kerobokan (Pararem Pangele) sudah di setor ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk dimintakan Harmonisasi dan Registrasi ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, tetapi sampai saat ini belum tuntas proses Harmonisasi dan Registrasinya.
 - d. permasalahan tersebut sudah selesai sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengadu (terlampir)
2. Bersurat kepada Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk memfasilitasi proses penyelesaian Harmonisasi dan Registrasi Draf Perarem tentang Krama Desa, Krama Tamiu dan Tamiu yang disampaikan oleh Desa Adat Kerobokan

Tabel 7

Hasil Pengaduan Masyarakat
Semester I Tahun 2021

NO	NO & TGL SURAT AGENDA	a.PELAPOR b.TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS TINDAK LANJUT			SANKSI			KET	
				DALAM PROSES	SELESAI		PP 53/2010	TP/TGR	PIDANA		LAIN2
					BENAR	TIDAK BENAR					
A.	Diterima dari Kementerian PAN/TP 5000										
			N	I	H	I	L				
B.	Diterima langsung										
		Pengaduan Saber Pungli	4	-	4	-	-	-	-	-	

2. Gratifikasi

UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan kepada Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, bersama ini kami sampaikan Laporan dimaksud, sebagai berikut:

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Tanggal dilaporkan ke UPG	Jenis Laporan (Penerimaan/ Penolakan)	Hubungan dengan pihak pemberi	Jenis Obyek Gratifikasi	Uraian Obyek Gratifikasi	Estimasi Nilai Obyek Gratifikasi	Pemanfaatan Obyek
1	Anak Agung Rai Sugiarta, S.STP.,M.Si.	Kepala UPTD PPRD Kota Denpasar	12 April 2023	1 Mei 2023	Penerimaan	Instansi Induk (Bapenda Provinsi Bali)		Baliho 1 buah dan Spanduk 5 buah	Tidak diketahui	Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi
2	I Gede Budiana, SE	Ke TU pada UPTD PPRD di Kabupaten Karangasem	15 Juni 2023	30 Juni 2023	Penerimaan	Instansi Induk (Bapenda Provinsi Bali)		Baliho 3 buah dan Spanduk 15 buah	Tidak diketahui	Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi

3. SP4N Lapor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Bersama ini kami sampaikan laporan pengaduan masyarakat melalui kanal *website* www.bali.lapor.go.id, yang diterima Sekretariat SP4N-LAPOR! Provinsi Bali. Kondisi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut :

Total Pengaduan	Belum Ditindaklanjuti oleh OPD	Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem Aplikasi	Selesai
560	0	9	550

Adapun pengaduan yang **Belum Ditindaklanjuti oleh OPD** dan sedang **Dalam Proses Menunggu Penyelesaian dari Sistem**, sebagai berikut :

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
1.	<p><u>Baksos Ilegal Kesehatan Hewan #6680527</u></p> <p>Tanggal 28 juni klinik amore masih melakukan baksos subsidi yang dilarang di bali. aturan organisasi adalah baksos layanan kesehatan hewan dilarang bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berbayar/tidak gratis , 2. komersil (subsidi/diskon) 3. tidak memiliki izin dari organisasi dokter hewan indonesia cabang bali atau tidak mendapatkan izin dari dinas membidangi kesehatan hewan di daerah.mohon ditindaklanjuti.. kalau perlu ditutup dengan garis segel. 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali		√	
2.	<p><u>Baksos Ilegal Tanpa Izin #6667306</u></p> <p>Tanggal 26 juni klinik amore masih melakukan baksos subsidi yang dilarang di bali. aturan organisasi adalah baksos layanan kesehatan hewan dilarang bila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berbayar/tidak gratis , 2. komersil (subsidi/diskon) 3. tidak memiliki izin dari organisasi dokter hewan indonesia cabang bali atau tidak mendapatkan izin dari dinas membidangi kesehatan hewan di daerah.mohon ditindaklanjuti.. kalau perlu ditutup dengan garis segel. 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali		√	

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
3.	<p><u>Kausalitas Pemerintah Propinsi Bali Tidak Taat Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori Dalam Menetapkan Pelaksanaan Ppdb Bagi Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat #6644081</u></p> <p>Yth. gubernur bali di propinsi bali kewenangan pendidikan menengah atas berada pada pemerintah propinsi bali dibawah pimpinan gubernur bali, akibat pemerintah propinsi bali tidak taat asas lex superior derogate legi inferiori dalam menetapkan pelaksanaan ppdb bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh satuan pendidikan dibawah naungan yayasan menorah abadi kausalitas kompetensi kalangan akademisi hukum skpd pemerintah propinsi bali dalam membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terkait satuan pendidikan kompetensinya akademisi pendidikan gelar sarjana pendidikan dan ketua yayasan kompetensinya theologi gelar theologiae doctor bukan kalangan akademisi hukum berakibat aturan yang ditetapkan yayasan menorah abadi yg berlaku sampai saat ini tidak ada pembebasan biaya bagi jalur afirmasi bahkan tidak menerima ppdb tahun ajaran 2023/2024 jalur afirmasi dengan nomor induk berusaha 9120207492849 status izin usaha belum memenuhi komitmen mohon diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku nggih atas taat asas pemerintahan yang baik mematuhi ketentuan segala peraturan perundangan yang berlaku kepada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan satuan pendidikan dibawah naungan yayasan menorah abadi</p>	Biro Hukum Setda Provinsi Bali		√	

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
4.	<p><u>Gaji Tidak Dibayar Dan Phk Dadakan Tanpa Pesangon #6665770</u></p> <p>Gaji kami tidak dibayarkan selama 2 bulan dan kami tetap disuruh bekerja sampai kami akhirnya diphk dadakan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa ada uang pesangon hingga sekarang</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	
5.	<p><u>Gaji Tidak Dibayar Perusahaan #6664519</u></p> <p>Saya bekerja di pt.gha fin tech dan mereka tidak bayar gajj bulan juni. sesuai kontrak,harusnya gaji dibayarkan setiap tanggal 15.</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	
6.	<p><u>Peningkatan Jalan Raya #6663406</u></p> <p>Om swastyastu, mengingat tingginya volume lalu lintas, maka kepada opd terkait di pemprov bali disarankan agar melakukan perbaikan dan juga pelebaran jalan di jalan raya singapadu. selain itu disarankan untuk menambah traffic light di simpang spbu tebongkang singakerta ubud karena sudah terlalu semrawut. semoga tulisan ini dapat diterima, terima kasih.</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali		√	
7.	<p><u>Jasa Layanan Kendaraan Mewah Tanpa Ijin#6639837</u></p> <p>Mohon diatensi, usaha usaha layanan penyedia kendaraan mewah di bali yang tidak memiliki izin dan dicurigai dikelola oleh pihak asing tanpa izin usaha. nama akun ig usaha mereka luxurybali1, hard_lux_bali dan banyak lainnya, kendaraanpun 90% plat b (jakarta). kecurigaan usaha ini dilindungi oleh oknum aparat hukum sehingga selama ini tidak tersentuh hukum, aturan sudah jelas perihal semua usaha transportasi di bali wajib kendaraan plat dk (bali). dan pihak asing tanpa izin usaha yang lengkap tidak boleh membuat usaha atau kerja di indonesia.</p>	Dinas Perhubungan Provinsi Bali		√	

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
8.	<p><u>Gaji Yang Tidak Dibayar #6658105</u></p> <p>Saya ex-karyawan perusahaan dni bali dan sudah di phk sejak tanggal 1 juni 2023. penghitungan masa penggajian dari tanggal 19 - 18 bulan berjalan berikutnya. gaji terakhir yang saya terima adalah periode bulan april - mei 2023 dan periode mei - juni dan juni - juli yang seharusnya saya terima tanggal 31 mei 2023 belum juga saya terima sampai sekarang.saya sudah melakukan media kepada hrga manager dni tetapi semenjak seminggu lalu tidak ada tanggapan lagi. berarti bisa saya simpulkan bahwa perusahaan tidak mau membayarkan gaji saya pada bulan aktif kerja (periode mei - juni dan juni - juli.apa yang harus saya lakukan lagi untuk mengambil hak saya, bapak/ibu?terima kasih</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali		√	
9.	<p><u>Permintaan Informasi Statistik Tentang Persediaan Properti Yang Diperdagangkan Di Bali #6651737</u></p> <p>Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. nama saya adalah resi budiman , dan saya menghubungi anda dalam konteks melakukan analisis pasar terhadap perdagangan properti di bali. saat ini, saya tertarik untuk memperoleh informasi statistik tentang persediaan properti (rumah , villa , hotel , ruko)yang diperdagangkan di bali. karena saya ingin mendapatkan data yang akurat dan terkini, saya dengan ini memohon bantuan dari instansi yang berwenang. saya ingin meminta informasi terkait poin-poin berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah total properti yang diperdagangkan di bali dalam tahun 2022-2023 terakhir. 2. rata-rata harga jual properti di bali dalam tahun 2022-2023 terakhir. 3. pembagian regional transaksi properti di bali. 	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali		√	

No.	Isi Laporan Awal	OPD yang Berwenang Menindaklanjuti	TINDAK LANJUT		Ket
			BELUM	DLM PROSES	
	<p>4. tren atau perubahan dalam pasar properti dalam beberapa tahun terakhir. saya sangat berterima kasih apabila anda dapat memberikan informasi ini kepada saya. data yang saya dapatkan akan digunakan semata-mata untuk keperluan penelitian dan akan dijaga kerahasiaannya. jika diperlukan, saya siap memberikan informasi lebih lanjut mengenai studi saya atau mengenai diri saya. terima kasih sebelumnya atas perhatian dan kerjasamanya. saya sangat mengharapkan tanggapan positifnya</p>				

BAB V

KESIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023 telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, reviu RKPD, DAK, LPPD, LKjIP, RKA, RKA Perubahan, KUA PPAS, KUA PPAS Perubahan dan Reviu BMD Pemerintah Provinsi Bali. Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali, dari 36 Perangkat Daerah yang di lakukan evaluasi hasilnya dapat di kemukakan bahwa 36 Perangkat Daerah mendapatkan nilai A (Memuaskan). Laporan hasil evaluasi Semester II Tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI Pemerintah Provinsi Bali, kami mengusulkan : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 94,06, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 92,93, UPTD. Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 91,51, UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 89,73, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,85, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 88,45. Pada Semester II Tahun 2023 dilaksanakan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung. Dari hasil penilaian 5 (lima) Perangkat Daerah yang masuk nominasi, adalah berupa 3 (tiga) Perangkat Daerah terbaik yang berhak mendapat penghargaan ***Adhyasta Prajaniti***

Menuju Bali Era Baru Tahun 2023, antara lain : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dan Biro Hukum Setda Provinsi Bali. Inspektorat Daerah Provinsi Bali melaksanakan 3 kegiatan Probit Audit antara lain Probit Audit pada Tahap Pelaksanaan pada Bulan April 2023 sampai dengan Progres Minggu ke-39 (tiga puluh sembilan) untuk Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Probit Audit Tahap Pelaksanaan sampai dengan Serah Terim Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD Untuk Belanja Modal Bangunan Kesehatan Berupa Pengawasan Pembangunan Lanjutan Gedung Layanan Kanker Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, Probit Audit Kegiatan Penyelenggara Jalan Provinsi Pengawasan Teknik Ruas Jalan Provinsi Ubud – Tegalalang – Bubungbayung. Kegiatan yang juga dilakukan pada Semester II Tahun 2023 adalah monitoring Dana BOS pada Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung dan Karangasem pada 21 Sekolah dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 20.656.721.514,00. Inspektorat Daerah Provinsi Bali juga telah melakukan monitoring terhadap Dana Desa pada Semester II Tahun 2023 yaitu 59 desa di 5 Kabupaten (Tabanan, Buleleng, Gianyar, Bangli, Klungkung) dengan total anggaran yang diawasi sebesar ± Rp. 59.000.000.000,00. hasil rekonsiliasi/pemantauan tindak lanjut oleh Tim Pengawas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2023, Provinsi Bali mencapai penyelesaian **99,93%**. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Bali terdapat 414 temuan dan 456 rekomendasi. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, 443 rekomendasi telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti, 13 masih dalam proses dan tidak ada yang belum ditindaklanjuti. Pada Semester II Tahun 2023, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri terdapat 24 rekomendasi yang statusnya

sudah sesuai/selesai dengan persentase **82,7%** dan terdapat 5 rekomendasi yang masih dalam proses. Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Khusus nilai capaian **Pemerintah Provinsi Bali** sebesar **99,20%** dan menduduki **Peringkat I dari 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia**. Jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pengaduan menyangkut saber pungli, 2 (dua) pengaduan menyangkut gratifikasi, dan 560 (lima ratus enam puluh) pengaduan menyangkut SP4N Lapor.

B. Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi sumber daya manusia (APIP) belum sepenuhnya memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja.
- b. sistem pengendalian internal dalam proses audit belum optimal.
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pelaksanaan audit di lapangan. masih ada temuan yang belum terselesaikan.
- d. Komitmen objek pemeriksaan belum optimal dalam menangani tindak lanjut.
- e. Koordinasi dengan unit kerja lain belum berjalan secara optimal.
- f. Pola kerja pegawai yang belum terorientasikan pada prinsip pengawasan.

C. Rekomendasi

Atas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. adanya program peningkatan kuantitas dan kualitas auditor melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan sertifikasi.
- b. dibuatkan telaahan yang peruntukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan, dan dilakukan *cross check* antar inspektur pembantu atas semua temuan yang dilakukan melalui *expose*.

- c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- d. komitmen dari segenap kepala unit kerja untuk bekerja normatif dan taat aturan.
- e. adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi.
- f. meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- g. meningkatkan pola kerja pegawai agar berorientasi pada prinsip pengawasan

BAB VI PENUTUP

Dengan adanya Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP ini diharapkan kinerja APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan ini sangat diharapkan kerjasama dan kedisiplinan APIP. Tanpa adanya kerjasama dan kedisiplinan tersebut, Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali Semester II Tahun 2023 akan sulit dicapai. Melalui penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketahui secara terinci. Informasi ini diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI
JALAN D.I PANJAITAN NO 14
NITI MANDALA RENON DENPASAR**